

PROGRAMA

PENYULUHAN PERTANIAN NASIONAL

TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2018 dapat diselesaikan. Program Penyuluhan Pertanian Nasional disusun sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) dengan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program Penyuluhan Pertanian Tahun 2018 merupakan perencanaan tertulis serta sistematis sebagai acuan dan pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. Program Penyuluhan Pertanian Tahun 2018 disusun mulai dari Program Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional.

Program Penyuluhan Pertanian Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2018 merupakan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian Pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya, sebagai arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Program Penyuluhan Pertanian Tahun 2018 memuat rencana penyuluhan sebagai acuan para Penyuluh Pertanian pada masing-masing tingkatan wilayah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTP).

Proses penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Tahun 2018 menyesuaikan dengan proses perencanaan pembangunan pertanian. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) merupakan suatu tahap yang harus dilalui dalam proses pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Untuk itu, sebelum penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Tahun 2018,

dilakukan rembugtani desa/kelurahan atau mimbar sarasehan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional, guna mengakomodasikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha dalam pembangunan pertanian.

Selanjutnya dari hasil Musrenbangtan, disusun Programa Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2018, untuk selanjutnya disahkan dan dijabarkan ke dalam RKTP.

Jakarta, Desember 2017

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,

Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si

NIP. 19650723 199403 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
BAB. II KONDISI UMUM	5
2.1. Kinerja Pembangunan Pertanian 2015 – 2017	5
2.2 Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2017	8
2.3 Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2018	25
2.4 Sumber Daya Penyuluhan Pertanian	30
BAB. III EVALUASI PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2017	37
3.1 Kelembagaan	37
3.2 Ketenagaan	39
3.3 Penyelenggaraan	41
3.4 Sarana dan Prasarana	42
3.5 Program dan Pembiayaan	43
3.6 Permasalahan	44
BAB. IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM AKSI PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2018	53
4.1 Kebijakan	54
4.2 Strategi	54

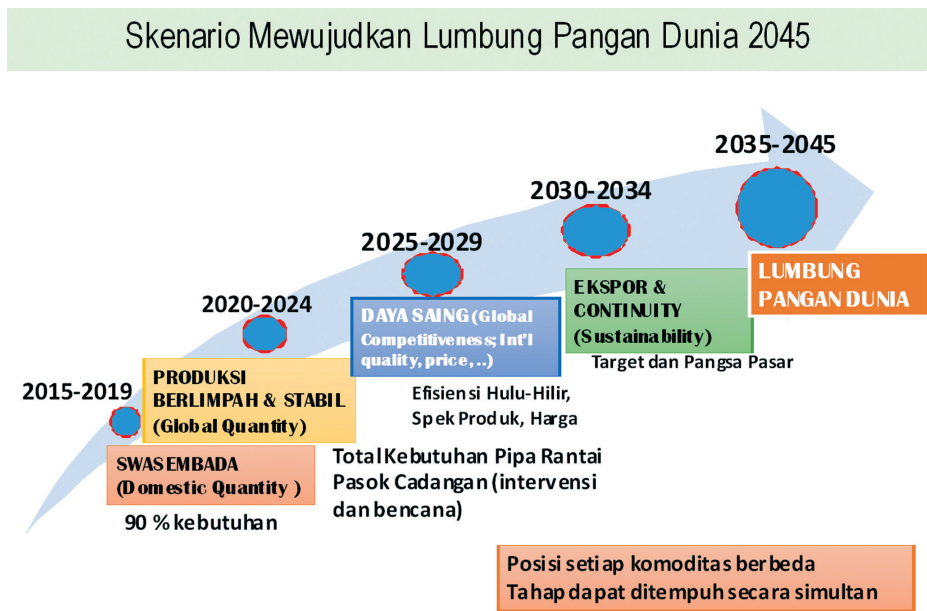
BAB V. RENCANA PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2018	57
5.1 Penyusunan Program	57
5.2 Evaluasi	58
5.3 Kelembagaan	58
5.4 Ketenagaan	59
5.4 Penyelenggaraan	61
BAB. VI PENUTUP	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

NAWACITA sebagai agenda prioritas Kabinet Kerja Tahun 2014 – 2019 mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, agar pemerintah Indonesia dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045 dengan skenario sebagai berikut:



Sumber: Kementerian Pertanian Tahun 2017

Kedaulatan pangan merupakan kemampuan suatu negara dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri; serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai

dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pada tahun 2015 – 2019 Kementerian Pertanian telah menetapkan target pencapaian produksi 11 komoditas strategis nasional, meliputi swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai. Sejak akhir tahun 2014 Kementerian Pertanian mencanangkan Program Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE) untuk percepatan pencapaian produksi padi, jagung dan kedelai dengan dukungan APBN yang dilanjutkan pada tahun 2015 – 2017 termasuk komoditas strategis nasional lainnya, meliputi bawang merah, cabai, sapi/ kerbau, tebu, kakao, kopi, kelapa sawit dan karet.

Selama tahun 2015 – 2019 sektor pertanian masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain jumlah penduduk yang sudah mencapai 259 juta jiwa, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, terbatasnya infrastruktur (jaringan irigasi, jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan), kurang tersedianya benih/ bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang tidak terkendali, ketergantungan konsumsi beras, kompetisi pemanfaatan air dan status kepemilikan lahan. Selain sejumlah kendala tersebut, pembangunan pertanian ke depan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain (1) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); (2) otonomi daerah; (3) perubahan pola konsumsi; dan (4) dinamika pasar pangan.

Selanjutnya, target pembangunan sektor pertanian tahun 2018 yaitu produksi komoditas strategis nasional tanaman pangan meliputi padi sebesar 87.987.100 ton, jagung 33.080.786 ton dan kedelai 2.900.000 ton dengan peningkatan produksi padi 2,82%, jagung 8,30% dan

kedelai 141,67% dari target tahun 2017. Target produksi komoditas strategis nasional tanaman hortikultura tahun 2018 meliputi cabai 1.956.422 ton, bawang merah 1.293.846 ton, dan bawang putih 79.000 ton.

Target produksi komoditas strategis nasional tanaman perkebunan tahun 2018 meliputi tebu 2,95 juta ton gula kristal putih, kelapa sawit 34,52 juta ton CPO, karet 3,68 juta ton karet kering, kopi 0,76 juta ton biji berasan, kakao 0,92 juta ton biji kering, kelapa dalam 3,45 juta ton kopra (Sumber: Renstra Kementan 2015-2019).

Target produksi daging tahun 2018 sebesar 1.076.170 ton dengan peningkatan produksi 6,87% dari target tahun 2017. Untuk pencapaian produksi daging tersebut, diupayakan melalui Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB). UPSUS SIWAB tersebut mencakup dua program utama yaitu: (1) peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan (2) Intensifikasi Kawin Alam (INKA), yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/ PK.210/10/2016, tentang UPSUS Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu dukungan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di setiap tingkatan wilayah pemerintahan yang terintegrasi dengan pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian tersebut meliputi aspek-aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian diarahkan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengelolaan usaha berdasarkan prinsip-prinsip agribisnis.

Melalui sinkronisasi seluruh program dan kegiatan pada Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, serta program dan kegiatan organisasi petani di tingkat nasional, diharapkan Programa Penyuluhan Pertanian

Nasional ini dapat memberikan arah, pedoman sekaligus sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk mendukung pencapaian target pembangunan pertanian tahun 2018.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberi dukungan terhadap pencapaian target produksi tahun 2018 terutama 11 komoditas strategis nasional.

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2018 bertujuan:

- a. Memberikan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, baik di Pusat maupun di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; dan
- b. Memberikan acuan bagi Penyuluh Pertanian di Pusat dalam menyusun RKTP Tahun 2018.

BAB. II

KONDISI UMUM

2.1 Kinerja Pembangunan Pertanian Tahun 2015 - 2017

Pencapaian kinerja pembangunan pertanian tahun 2015 – 2017 diperlukan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan percepatan yang perlu dilakukan pada tahun 2018. Kinerja pembangunan pertanian dapat diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu indikator makro dan indikator produksi. Berdasarkan indikator makro, capaian kinerja pembangunan pertanian selama periode 2015 - 2016 sebagai berikut:

1. Rata-rata kontribusi PDB sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2016 sebesar 10,21% dengan pertumbuhan sekitar 3,16%. Sub-sektor peternakan (4,03%) merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sektor pertanian kemudian menyusul sub-sektor perkebunan (3,50%), sub-sektor tanaman hortikultura (2,69%), dan sub-sektor tanaman pangan (2,53%);
2. Investasi di sektor pertanian primer, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,93% dan 5,66% per tahun. Sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2016 sektor pertanian menyerap sekitar 37,77 juta orang atau sekitar 30,11% dari total tenaga kerja;
3. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 101,59 tahun 2015 menjadi 101,66 tahun 2016.

Produksi padi tahun 2017 (ARAM II 2017) mencapai 81.352.000 ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat 2,56% (1,99 juta ton) dari

tahun 2016. Produksi jagung tahun 2017 (ARAM II 2017) mencapai 27.952 juta ton pipilan kering atau meningkat 18,55% (4,37 juta ton pipilan kering) dari tahun 2016. Produksi kedelai tahun 2017 (ARAM II 2017) mencapai 542.000 ton biji kering atau turun 36,90% (380.000 ton) dari tahun 2016 (Sumber: BPS). Produksi tanaman hortikultura (prognosa 2017) meliputi bawang merah sebesar 1.510.961 ton atau meningkat 4,43% (64.101 ton) dari tahun 2016 dan cabai 2.060.199 ton atau meningkat 5,02% (98.625 ton) dari tahun 2016.

Produksi gula tahun 2017 (estimasi) mencapai 2.465.450 ton atau naik 10,90% (242.479 ton) dari tahun 2016. Selanjutnya, produksi kelapa sawit tahun 2017 mencapai 35.359.384 ton atau meningkat 6,40% (2.130.003 ton) dari tahun 2016. Produksi karet tahun 2017 mencapai 3.229.861 ton atau meningkat 2,28% (72.081 ton) dari tahun 2016. Demikian juga produksi kakao tahun 2017 mencapai 688.345 ton atau meningkat 5,57% (31.528 ton) dari tahun 2016. Produksi kopi tahun 2017 sebesar 637.539 ton atau menurun 0,27% (1.766 ton) dari tahun 2016. Sedangkan produksi daging tahun 2016 mencapai 3.356 ton atau meningkat 9,79% (299 ton) dari tahun 2015. Produksi telur tahun 2016 sebesar 2.031 ton atau meningkat 7,10% (135 ton) dari tahun 2015 dan produksi susu tahun 2016 sebesar 913 ton atau meningkat 9,29% (78 ton) dari tahun 2015.

Untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas prioritas strategis nasional, diupayakan melalui pendekatan berbasis kawasan sesuai dengan Permentan No. 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Tindak lanjut dari Permentan tersebut, sub sektor tanaman pangan telah melaksanakan pendekatan kawasan, sesuai dengan Keputusan Mentan No. 830 Tahun 2016 Tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional. Dengan demikian, kawasan padi tersebar di 284 kabupaten/kota, kawasan jagung di 166 kabupaten/kota, kawasan kedelai di 107 kabupaten/kota, dan kawasan ubi kayu di 70 kabupaten/kota.

Untuk sub sektor hortikultura telah ditetapkan kawasan cabai di 191 kabupaten/kota, kawasan bawang merah di 79 kabupaten/kota dan 57 kabupaten/kota kawasan jeruk. Pendekatan tipe kawasan pada sub sektor peternakan dilakukan berdasarkan komoditas (sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, dan itik). Jumlah kabupaten/kota kawasan komoditas peternakan berturut-turut, yaitu sapi potong 153 kabupaten/kota, sapi perah 17 kabupaten/kota, kerbau 27 kabupaten/kota, kambing 26 kabupaten/kota, domba 8 kabupaten/kota, babi 17 kabupaten/kota, ayam buras 10 kabupaten/kota, dan itik 11 kabupaten/kota.

Khusus untuk sub sektor perkebunan, pendekatan kawasan dilakukan berdasarkan komoditas (tebu, kopi, teh, kakao, jambu mete, lada, cengkeh, pala, kelapa sawit, karet dan kelapa), meliputi komoditas tebu 51 kabupaten/kota, kopi 59 kabupaten/kota, teh 8 kabupaten/kota, kakao 61 kabupaten/kota, jambu mete 16 kabupaten/kota, lada 22 kabupaten/kota, cengkeh 31 kabupaten/kota, pala 14 kabupaten/kota, kelapa sawit 34 kabupaten/kota, karet 33 kabupaten/kota dan kelapa 41 kabupaten/kota.



Sumber: Kementerian Pertanian

2.2 Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2017

Pelaksanaan pembangunan pertanian tahun 2017 diuraikan menurut masing-masing sub sektor sebagai berikut:

2.2.1 Tanaman Pangan

a. Produksi Komoditas Tanaman Pangan

Produksi dan produktivitas komoditas unggulan tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar) tahun 2017 tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2017

No.	Jenis Komoditas	Tahun		Peningkatan (%)
		2016	2017 *)	
1.	Padi			
	Produksi (ton)	79.355.000	81.352.000	2,56
	Luas panen (ha)	15.156.000	15.768.000	4,17
	Produktivitas (ku/ha)	52,36	51,55	(1,55)
2.	Jagung			
	Produksi (ton)	23.578.000	27.952.000	18,55
	Luas panen (ha)	4.444.000	5.375.000	20,95
	Produktivitas (ku/ha)	53,05	52,00	(1,98)
3.	Kedelai			
	Produksi (ton)	860.000	542.000	(36,90)
	Luas panen (ha)	577.000	357.000	(38,13)
	Produktivitas (ku/ha)	14,90	15,20	2,01
4.	Kacang Tanah			
	Produksi (ton)	570.000	480.000	(15,80)
	Luas panen (ha)	436.000	364.000	(16,63)
	Produktivitas (ku/ha)	13,07	13,20	(0,99)
5.	Kacang hijau			
	Produksi (ton)	253.000	244.000	(3,57)
	Luas panen (ha)	224.000	207.000	(7,36)
	Produktivitas (ku/ha)	11,30	11,76	4,07

No.	Jenis Komoditas	Tahun		Peningkatan (%)
		2016	2017 *)	
6.	Ubi kayu			
	Produksi (ton)	20.261.000	19.046.000	19.046.000
	Luas panen (ha)	823.000	779.000	779.000
	Produktivitas (ku/ha)	246,26	244,59	244,59
7.	Ubi jalar			
	Produksi (ton)	2.169.000	2.023.000	(6,77)
	Luas panen (ha)	124.000	113.000	(8,93)
	Produktivitas (ku/ha)	175,55	179,72	2,38

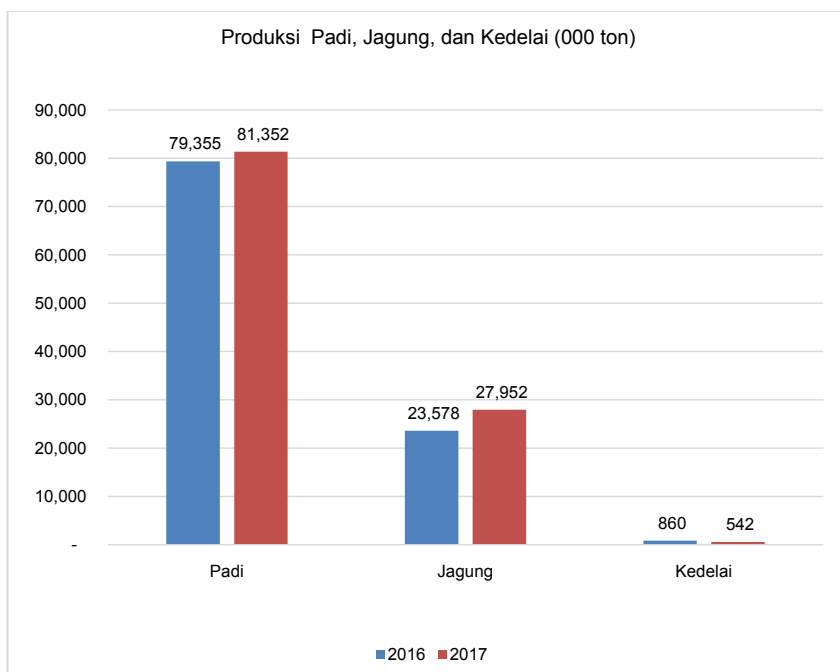
Sumber: BPS

*) ARAM II BPS 2017

() Berarti minus

b. Permasalahan

- Pengelolaan produksi tanaman pangan (serealia), khususnya padi dan jagung, aneka kacang (kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau), dan umbi khususnya ubi kayu dan ubi jalar belum optimal;
- Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan belum optimal;
- Adanya gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan;
- Penanganan pascapanen tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) belum optimal sehingga mutu tanaman pangan rendah;
- Pemanfaatan sumber modal usaha belum optimal; dan
- Pola konsumsi pangan masyarakat belum sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu pola konsumsi pangan yang “ Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)”.



2.2.2 Hortikultura

a. Produksi Komoditas Hortikultura

Produksi dan produktivitas komoditas unggulan hortikultura tahun 2016 tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Komoditas Unggulan Hortikultura Tahun 2016

No.	Jenis Komoditas	Tahun		Peningkatan (%)
		2015	2016	
A.	Buah			
1.	Mangga			
	Produksi (ton)	2.178.826	1.814.540	(16,72)
	Luas Panen (ha)	197.502	161.730	(18,12)
	Produktivitas (ton/ha)	10,95	11,22	2,46

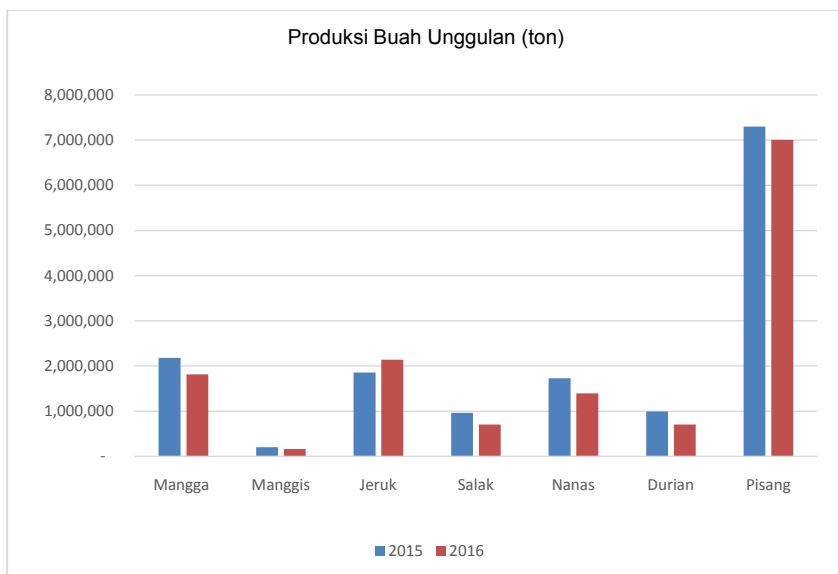
No.	Jenis Komoditas	Tahun		Peningkatan (%)
		2015	2016	
2.	Manggis			
	Produksi (ton)	203.100	162.862	(19,82)
	Luas Panen (ha)	22.377	21.298	(4,83)
	Produktivitas (ton/ha)	8,31	7,65	(7,95)
3.	Jeruk (siam/keprok dan besar)			
	Produksi (ton)	1.856.076	2.138.458	15,21
	Luas Panen (ha)	51.556	64.795	25,67
	Produktivitas (ton/ha)	36,00	33,00	(8,34)
4.	Salak			
	Produksi (ton)	965.198	702.345	(27,24)
	Luas Panen (ha)	23.556	23.024	(2,26)
	Produktivitas (ton/ha)	33,22	30,50	(8,19)
5.	Durian			
	Produksi (ton)	995.729	735.419	(26,15)
	Luas Panen (ha)	72.559	57.198	(21,18)
	Produktivitas (ton/ha)	21,41	12,86	(39,94)
6.	Pisang			
	Produksi (ton)	7.299.266	7.007.117	(4,01)
	Luas Panen (ha)	88.728	81.812	(7,80)
	Produktivitas (ton/ha)	77,64	85,65	10,31
7.	Jambu Biji			
	Produksi (ton)	195.743	206.986	5,74
	Luas Panen (ha)	8.864	8.923	0,66
	Produktivitas (ton/ha)	21,41	23,20	8,36
8.	Sirsak			
	Produksi (ton)	58.987	55.907	(5,23)
	Luas Panen (ha)	4.445	4.348	(2,19)
	Produktivitas (ton/ha)	13,09	12,86	(2,76)
9.	Pepaya			
	Produksi (ton)	851.528	904.282	6,19
	Luas Panen (ha)	9.287	10.167	9,47
	Produktivitas (ton/ha)	85,75	88,94	3,72

No.	Jenis Komoditas	Tahun		Peningkatan (%)
		2015	2016	
10.	Nenas			
	Produksi (ton)	1.729.600	1.396.141	(19,28)
	Luas Panen (ha)	12.646	13.067	3,32
	Produktivitas (ton/ha)	117,71	106,85	(9,23)
B.	Sayur			
11.	Cabai Besar			
	Produksi (ton)	1.045.182	1.045.587	0,03
	Luas Panen (ha)	120.847	123.404	2,11
	Produktivitas (ton/ha)	8,65	8,47	(2,09)
12.	Cabai Rawit			
	Produksi (ton)	869.938	915.988	5,29
	Luas Panen (ha)	134.869	136.818	1,44
	Produktivitas (ton/ha)	6,45	6,70	0,04
13.	Bawang Merah			
	Produksi (ton)	1.229.184	1.446.860	17,70
	Luas Panen (ha)	122.126	149.635	22,52
	Produktivitas (ton/ha)	10,06	9,67	(3,88)
14.	Bawang Putih			
	Produksi (ton)	20.295	21.150	4,21
	Luas Panen (ha)	2.563	2.407	(6,09)
	Produktivitas (ton/ha)	7,92	8,79	10,98
15.	Kentang			
	Produksi (ton)	1.219.270	1.213.038	(0,52)
	Luas Panen (ha)	66.983	66.450	(0,80)
	Produktivitas (ton/ha)	18,20	18,26	0,32
16.	Wortel			
	Produksi (ton)	522.520	537.521	2,87
	Luas Panen (ha)	30.280	31.814	5,06
	Produktivitas (ton/ha)	17,26	16,90	(2,09)
17.	Kubis			
	Produksi (ton)	1.443.232	1.513.315	4,85
	Luas Panen (ha)	64.625	71.934	11,30
	Produktivitas (ton/ha)	22,33	21,04	(5,78)

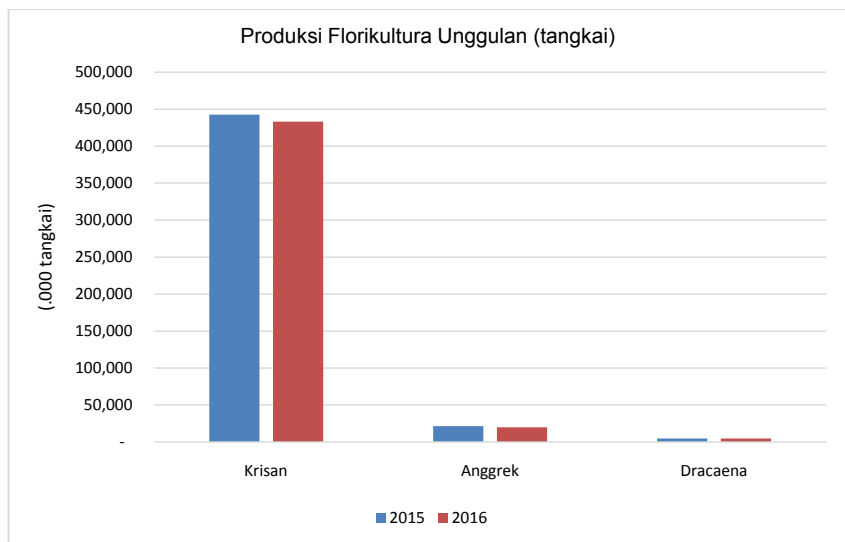
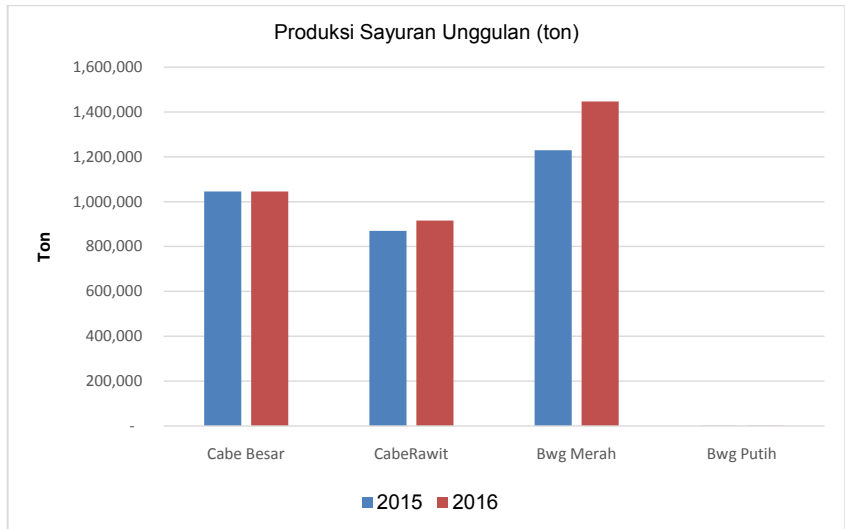
No.	Jenis Komoditas	Tahun		Peningkatan (%)
		2015	2016	
18.	Jamur			
	Produksi (ton)	33.485	40.914	22,18
	Luas Panen (ha)	536	467	(12,88)
	Produktivitas (ton/ha)	62,47	87,61	40,24
C.	Florikultura			
19.	Krisan			
	Produksi (tangkai)	442.698.194	433.100.145	(0,09)
	Luas Panen (m2)	10.871.199	10.914.154	0,39
	Produktivitas (tangkai/m2)	40,72	39,68	(2,56)
20.	Anggrek			
	Produksi (tangkai)	21.513.280	19.978.078	(7,14)
	Luas Panen (m2)	1.134.221	1.387.241	22,30
	Produktivitas (tangkai/m2)	18,97	14,4	(24,10)
21.	Dracaena			
	Produksi (tangkai)	4.712.824	4.691.549	(0,46)
	Luas Panen (m2)	129.278	18.000	(86,08)
	Produktivitas (tangkai/m2)	36,45	49,18	34,92
22.	Melati			
	Produksi (kg)	31.582.698	31.183.991	(1,27)
	Luas Panen (m2)	16.180.121	15.196.235	(6,09)
	Produktivitas (kg/m2)	1,95	2,05	5,12
D.	Tanaman Obat			
23.	Jahe			
	Produksi (kg)	313.064.070	340.341.081	8,71
	Luas Panen (m2)	153.238.124	125.526.074	(18,09)
	Produktivitas (kg/m2)	2,04	2,63	28,92
24.	Temulawak			
	Produksi (kg)	27.840.170	22.123.632	(20,54)
	Luas Panen (m2)	14.803.423	10.993.636	(25,74)
	Produktivitas (kg/m2)	1,88	1,93	2,65
25.	Laos/Lengkuas			
	Produksi (kg)	55.149.717	59.453.023	7,80
	Luas Panen (m2)	20.422.238	20.516.112	0,45
	Produktivitas (kg/m2)	2,70	2,73	1,11

No.	Jenis Komoditas	Tahun		Peningkatan (%)
		2015	2016	
26.	Kunyit			
	Produksi (kg)	113.101.083	107.770.473	(4,72)
	Luas Panen (m2)	56.578.585	50.195.694	(11,29)
	Produktivitas (kg/m2)	2,00	2,08	4,00
27.	Kencur			
	Produksi (kg)	35.971.906	36.540.786	1,58
	Luas Panen (m2)	21.570.175	22.755.008	5,49
	Produktivitas (kg/m2)	1,67	1,54	(7,79)

Sumber: BPS (diolah oleh Direktorat Jenderal Hortikultura)
() Berarti minus

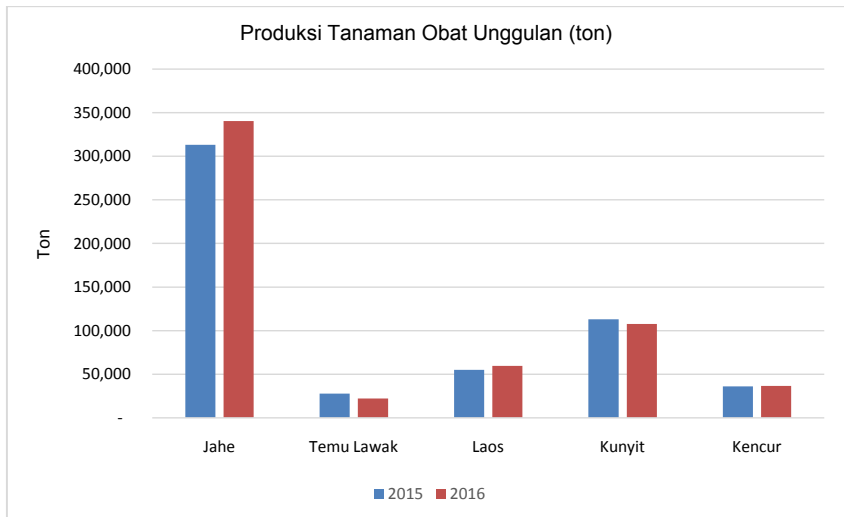


Selain komoditas unggulan tersebut, juga dikembangkan komoditas penyangga, antara lain jambu kristal, alpukat, melon, sukun, semangka, nangka, sawo, aneka sayur, dan florikultura (*leather leaf*, *sedap malam*, *raphis*, *heliconia*).



Komoditas penyangga tersebut mempunyai karakteristik: (1) menyangga kebutuhan sepanjang waktu/musim, (2) komoditas substitusi impor, (3) produktivitas rendah, (4) areal terpencar dan skala usaha kecil, (5) varietas tidak seragam dan asalan, serta (6) spesifik pada agroekologi tertentu. Komoditas lainnya antara lain duku, srikaya jumbo, jambu air dalhari termasuk kelompok komoditas rintisan

yang memiliki karakteristik (1) sebagai komoditas unggulan daerah, (2) varietas unggul dan unik, (3) digunakan untuk optimalisasi lahan/ruang, dan (4) potensi permintaan cenderung meningkat.



b. Permasalahan

- Kebun/lahan usaha hortikultura diusahakan dengan skala usaha kecil dan belum efisien;
- Produksi, produktivitas dan mutu rendah;
- Ketersediaan benih bawang merah sangat kurang, sementara yang tersedia dalam bentuk biji;
- Sebagian besar tanaman buah merupakan tanaman warisan, sehingga varietasnya tidak sesuai dengan tuntutan pasar komersial;
- Preferensi/tuntutan konsumen terhadap kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk hortikultura makin tinggi dan ketat;

- Masih rendahnya Citra, Apresiasi dan Cinta (CAC) terhadap produksi hortikultura nusantara;
- Petani hortikultura, umumnya sangat tergantung pada penggunaan saptoran kimiawi (agrochemical) yang dapat merusak sumberdaya alam dan lingkungan, serta tidak aman dikonsumsi;
- Meningkatnya kecenderungan impor produk hortikultura akibat kebijakan pasar bebas;
- Budidaya cabai masih fokus pada musim hujan, sehingga harga cabai pada musim kemarau cenderung meningkat tajam dan memberikan kontribusi terhadap terjadinya inflasi;
- Belum berkembangnya jaringan kemitraan usaha hortikultura, baik di hulu maupun di hilir;
- Kebijakan pengaturan harga cabai dan bawang merah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendag No. 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan di Konsumen. Diharapkan pengaturan harga ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (bukan dalam bentuk Peraturan Menteri);
- Bulog belum terbiasa dengan tataniaga cabai dan bawang merah untuk mampu menampung pasokan dari pelaku utama dan pelaku usaha;
- Pengembangan komoditas hortikultura terkendala dengan kebijakan pengembangan komoditas padi, jagung dan kedelai, mengakibatkan pengembangan komoditas hortikultura bergeser ke lereng-lereng

pegunungan yang mengganggu kelestarian lingkungan;

- Pengembangan komoditas cabai dan bawang merah skala pekarangan belum optimal; dan
- Dampak perubahan iklim sangat mempengaruhi pengembangan komoditas hortikultura.

2.2.3 Perkebunan

a. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan

Produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan (kelapa sawit, kakao, karet, kelapa, kopi, tebu, jambu mete, cengkeh, teh, tembakau, kapas, lada, jarak pagar, nilam dan kemiri sunan) periode tahun 2017 tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Produksi, Luas Areal dan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2017

No.	Jenis Komoditas	Tahun		Peningkatan (%)
		2016	2017 **)	
1.	Kelapa Sawit			
	Produksi CPO (ton)	33.229.381	35.359.384	6,40
	Luas areal (ha) *)	11.914.499	12.307.677	3,00
	Produktivitas (kg/ha)	3.763	3.817	1,43
2.	Kakao			
	Produksi biji kering (ton)	656.817	688.345	5,57
	Luas areal (ha) *)	1.701.351	1.691.334	(0,59)
	Produktivitas (kg/ha)	785	787	0,25
3.	Karet			
	Produksi karet kering (ton)	3.157.780	3.229.861	2,28
	Luas areal (ha) *)	3.639.092	3.672.123	0,91
	Produktivitas (kg/ha)	1.045	1.058	1,24

No.	Jenis Komoditas	Tahun		Peningkatan (%)
		2016	2017 **)	
4.	Kelapa			
	Produksi kopra (000 ton)	2.890.735	3.871.280	(0,67)
	Luas areal (000 ha) *)	3.566.103	3.544.393	(0,61)
	Produktivitas (kg/ha)	1.103	1.096	(0,63)
5.	Kopi			
	Produksi biji berasan (000 ton)	639.305	637.539	(0,27)
	Luas areal (ha) *)	1.228.512	1.227.787	(0,06)
	Produktivitas (kg/ha)	706	704	(0,28)
6.	Tebu			
	Produksi gula kristal putih (ton)	2.222.971	2.465.450	10,90
	Luas areal (ha) *)	445.520	453.456	1,78
	Produktivitas (kg/ha)	5.004	5.453	8,97
7.	Jambu mete			
	Produksi glondong kerinf (ton)	130.072	127.780	(1,76)
	Luas areal (ha) *)	515.349	515.250	(0,02)
	Produktivitas (kg/ha)	414	407	(1,69)
8.	Cengkeh			
	Produksi bunga kering (ton)	139.523	140.057	0,38
	Luas areal (ha) *)	542.281	542.750	0,09
	Produktivitas (kg/ha)	424	425	0,23
9.	Teh			
	Produksi daun kering (ton)	144.015	146.168	1,49
	Luas areal (ha) *)	117.268	118.252	0,84
	Produktivitas (kg/ha)	1.618	1.637	1,17
10.	Tembakau			
	Produksi daun kering (ton)	196.154	198.296	1,09
	Luas areal (ha) *)	206.337	206.514	2,09
	Produktivitas (kg/ha)	989	996	0,10
11.	Kapas			
	Produksi serat biji (ton)	715	700	(2,09)
	Luas areal (ha) *)	5.919	5.686	(3,93)
	Produktivitas (kg/ha)	178	180	1,12
12.	Lada			
	Produksi lada kering	82.168	82.964	0,96

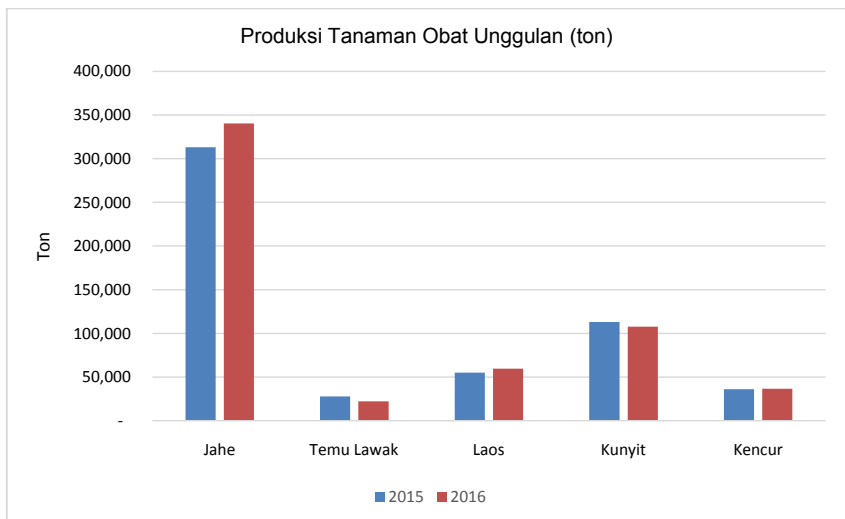
No.	Jenis Komoditas	Tahun		Peningkatan (%)
		2016	2017 **)	
	Luas areal (ha) **)	168.080	167.626	(0,27)
	Produktivitas (kg/ha)	833	837	0,48
13.	Nilam			
	Produksi minyak atsiri (ton)	1.954	1.991	1,89
	Luas areal (ha) *)	18.562	18.592	0,16
	Produktivitas (kg/ha)	160	163	1,87
14.	Kemiri Sunan			
	Produksi biji kering (ton)	6,00	7,00	16,67
	Luas areal (ha) *)	1.132	1.089	(3,80)
	Produktivitas (kg/ha)	190	193	1,57
15.	Sagu			
	Produksi tepung (ton)	440.516	489.543	11,12
	Luas areal (ha) *)	213.280	219.978	3,14
	Produktivitas (kg/ha)	3.695	3.871	4,76
16	Pala			
	Produksi biji kering (ton)	29.713	34.602	16,45
	Luas areal (ha) *)	154.224	169.587	9,96
	Produktivitas (kg/ha)	475	483	1,68

Sumber : Buku Saku Statistik Pembangunan Perkebunan Indonesia, Tahun 2016

*) Tanaman Menghasilkan (TM)

**) Angka sementara

() Berarti minus



b. Permasalahan

- Produksi dan produktivitas sebagian besar tanaman perkebunan (tanaman tahunan, tanaman penyegar, dan tanaman semusim) masih rendah;
- Pengembangan tanaman perkebunan (tanaman tahunan dan penyegar serta tanaman semusim) belum berbasis kawasan;
- Aktivitas kelembagaan petani/pekebun tanaman tahunan (kelapa sawit, karet, kelapa dan sagu) belum terorganisasikan dengan baik sehingga posisi tawar petani masih rendah;
- Pekebun sulit mengakses teknologi, sarana produksi, modal dan pasar;
- Pekebun belum memahami manfaat benih unggul dan bersertifikat;
- Pekebun belum menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- Pekebun belum melakukan penanganan panen dan pascapanen yang baik (*Good Handling Practice/GHP*);
- Tanaman sagu sebagai sumber pangan belum dibudidayakan dan dimanfaatkan secara optimal;
- Pekebun belum melakukan kegiatan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim;
- Terbatasnya lahan perkebunan untuk tanaman tahunan dan tanaman semusim serta terjadinya konversi lahan sehingga muncul konflik dan gangguan usaha perkebunan; dan

- Sering terjadi kebakaran lahan perkebunan sehingga Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan No. 47 tahun 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.

2.2.4 Peternakan

a. Produksi Komoditas Peternakan

Produksi komoditas unggulan peternakan (daging, telur dan susu) dan populasi ternak periode tahun 2016 tertera pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4. Produksi Komoditas Unggulan Peternakan Tahun 2016

No.	Komoditas	Produksi (Ton)		Peningkatan (%)
		2015	2016	
A.	Daging	3.056,8	3.356,3	9,79
1.	Sapi potong	506,7	518,5	2,32
2.	Kerbau	35,4	31,9	(9,89)
3.	Kambing	64,9	67,8	4,46
4.	Domba	44,5	45,9	4,14
5.	Babi	330,2	339,6	2,84
6.	Kuda	2,2	2,6	18,18
7.	Unggas	2.030,18	2.018,65	(0,57)
	a. Ayam lokal	299,8	285,0	(4,94)
	b. Ayam Ras Petelur	102,08	110,3	8,05
	c. Ayam Ras Pedaging	1.628,3	1.905,5	17,02
8.	Itik	34,9	41,9	20,05
9.	Kelinci	0,6	0,5	(16,66)
10.	Puyuh	0,9	1,0	11,11
11.	Merpati	0,3	0,4	33,33
12.	Itik Manila	5,3	5,6	5,66
B.	Telur	1.895,6	2.031,2	7,15
13.	Telur ayam ras petelur	1.372,8	1.485,7	(8,22)
14.	Telur itik	278,5	292,0	4,84

No.	Komoditas	Produksi (Ton)		Peningkatan (%)
		2015	2016	
15.	Telur ayam buras	190,7	196,7	3,14
16.	Puyuh	22,1	23,6	6,78
17.	Itik Manila	31,4	33,2	5,73
C.	Susu	835,1	912,7	9,29

Sumber: Statistik PKH Tahun 2017

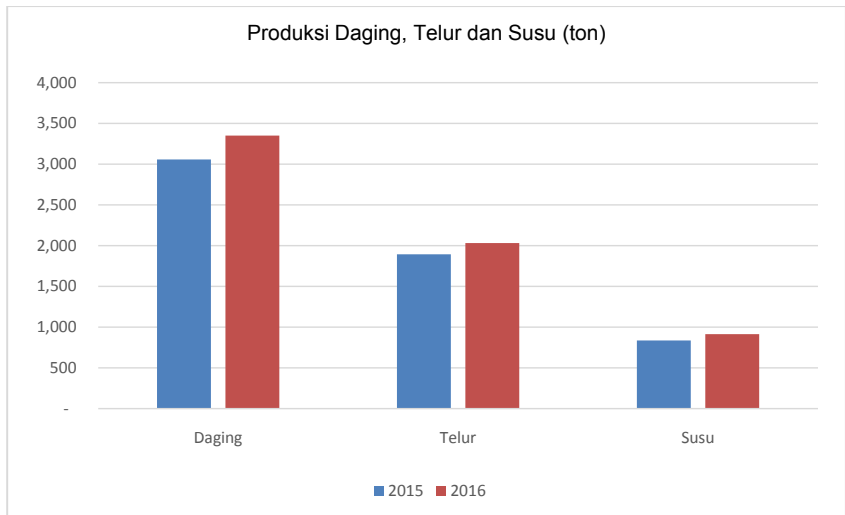
() Berarti minus

Tabel 5. Populasi Ternak Tahun 2016

No.	Jenis	Populasi (Ekor)		Peningkatan (%)
		2015	2016	
A.	Ruminansia			
1.	Sapi Potong	15.240	16.004	5.01
2.	Sapi Perah	519	534	2,89
3.	Kerbau	1.347	1.355	0,59
4.	Kuda	430	424	(1,39)
5.	Kambing	19.013	17.847	(6,13)
6.	Domba	17.025	15.717	(7,68)
B.	Non Ruminansia			
1.	Babi	7.808	7.903	1,20
C.	Unggas	1.968.640	2.088.080	6.06
1.	Ayam Buras	285.304	294.162	3.10
2.	Ayam Ras Petelur	155.007	161.350	4,09
3.	Ayam Ras Pedaging	1.528.329	1.632.568	6,82
4.	Itik	45.322	47.424	4,63
5.	Itik Manila	7.975	8.165	2,38
6.	Kelinci	1.103	1.201	8,97
7.	Puyuh	13.782	18.108	31,38
8.	Merpati	2.154	2.476	14,94

Sumber : Statistik PKH Tahun 2017

() Berarti minus



b. Permasalahan

- Penyediaan bahan pangan pokok nasional asal ternak belum optimal;
- Ketersediaan bahan pakan/pakan ternak masih kurang;
- Keamanan bahan pakan/pakan ternak masih rendah;
- Masih terjadi Penyakit Hewan Menular *Strategis*, *Zoonosis*, *Ekstotis (PHMSZE)*, antara lain penyakit *Brucellosis*, *Rabies*, *Hog Cholera*, *Avian Influenza* dan *Anthrax*;
- Akses terhadap inovasi teknologi peternakan, permodalan dan informasi, masih terbatas sehingga agribisnis peternakan belum berkembang dengan baik;
- Penerapan manajemen agribisnis peternakan (*Good Farming Practices* dan *Good Breeding Practices*) belum optimal;
- Pemahaman peternak tentang kebuntingan ternak ruminansia masih rendah; dan

- Pengetahuan dan keterampilan pelaku utama (peternak) dan pelaku usaha, serta kesadaran pemangku kepentingan dalam penyediaan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) masih kurang.

2.3 Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2018

Pada RPJMN tahap III (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Sasaran pembangunan pertanian meliputi sasaran makro dan sasaran produksi komoditas unggulan. Indikator pencapaian sasaran makro pembangunan pertanian antara lain diukur dari pertumbuhan PDB sektor pertanian (tidak termasuk kehutanan dan perikanan), pertumbuhan laju investasi (PMDN dan PMA), tersedianya tambahan lapangan kerja, dan NTP.

Rincian sasaran peningkatan PDB, laju investasi, kesempatan kerja, NTP dan sasaran produksi komoditas prioritas strategis nasional tahun 2018, sebagai berikut:

2.3.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Sasaran pertumbuhan PDB nasional sektor pertanian tahun 2018 sebesar 15,23%, meliputi: sub sektor tanaman pangan 2,99%, sub sektor hortikultura 2,87%, sub sektor perkebunan 5,02%, dan sub sektor peternakan 4,35% (Sumber: Renstra Kementan Tahun 2015 - 2019).

2.3.2 Investasi Sektor Pertanian

Sasaran Investasi sektor pertanian tahun 2018 melalui PMDN sebesar Rp. 11.678,2 milyar dengan laju pertumbuhan 6,2% dan PMA. sebesar US\$ 1.660,2 juta dengan laju pertumbuhan 5,9%.

2.3.3 Kesempatan Kerja

Sasaran tenaga kerja sektor pertanian tahun 2018 sebanyak 34.736.000 orang, namun dengan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor, maka diharapkan laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor pertanian menurun 0,44%.

2.3.4 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani yang menggambarkan perbandingan antara indeks yang diterima dan yang dikeluarkan oleh petani tahun 2018 diharapkan dapat mencapai 103,99.

2.3.5 Sasaran Produksi

Selain sasaran makro pembangunan pertanian, ditetapkan pula sasaran produksi komoditas unggulan nasional tahun 2018, sebagai berikut:

a. Komoditas Tanaman Pangan

Sasaran komoditas unggulan tanaman pangan tahun 2018 untuk tujuh komoditas unggulan tanaman pangan tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran Produksi Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2018

No.	Komoditas	Sasaran Produksi (Ton)		Peningkatan (%)
		2017	2018	
1.	Padi	85.573.888 *)	87.987.810	2,82
2.	Jagung	30.544.728 *)	33.080.786	8,30
3.	Kedelai	1.200.000 *)	2.900.000	141,67
4.	Kacang Tanah	768.970	782.400	1,75
5.	Kacang Hijau	300.350	304.850	1,50
6.	Ubi Kayu	27.623.800	28.187.400	2,04
7.	Ubi Jalar	2.750.000	2.800.000	1,81

Sumber: Renstra Kementan 2015 – 2019

*) Termasuk UPSUS PAJALE.

b. Komoditas Hortikultura

Sasaran produksi komoditas unggulan hortikultura tahun 2018 tertera pada Tabel 7.

Tabel 7. Sasaran Produksi Komoditas Hortikultura Tahun 2018

No.	Komoditas	Sasaran Produksi (Ton)		Peningkatan (%)
		2017	2018	
A.	Buah			
1.	Jeruk siam	1.859.201	1.845.159	(0,75)
2.	Mangga	2.520.140	2.460.565	(2,36)
3.	Manggis	118.713	152.926	28,80
4.	Nenas	1.879.799	2.003.037	6,55
5.	Salak	1.141.443	1.123.870	(1,54)
B.	Sayur			
1.	Bawang Merah	1.329.859	1.293.846	(2,71)
2.	Kentang	1.437.332	1.403.314	(2,37)
3.	Cabe Besar	1.245.739	1.174.098	(5,75)
4.	Cabe Rawit	916.929	782.324	(14,68)
C.	Tanaman Obat			
1.	Temulawak	26.502	45.519	71,76

No.	Komoditas	Sasaran Produksi (Ton)		Peningkatan (%)
		2017	2018	
D.	Tanaman Hias			
1.	Anggrek	21.759.028 *)	26.624.216 *)	22,36
2.	Krisan	465.140.433	580.586.899	24,82

Sumber: Renstra Kementan 2015 – 2019

*) Satuan Produksi: dalam tangkai

() Berarti minus

c. Komoditas Perkebunan

Sasaran luas tanam dan produksi komoditas unggulan perkebunan tahun 2018 tertera pada Tabel 8 dan Tabel 9.

Tabel 8. Sasaran Luas Tanam Menghasilkan/TM Komoditas Perkebunan Tahun 2018

No.	Komoditas	Sasaran luas Tanam (ha)		Peningkatan (%)
		2017	2018	
1.	Tebu	463.000	489.000	5,62
2.	Kelapa Sawit	7.799.000	7.930.000	1,68
3.	Karet	3.156.000	3.206.000	1,58
4.	Kelapa	2.673.000	2.684.000	0,41
5.	Kakao	1.238.000	1.267.000	2,34
6.	Kopi	981.000	991.000	1,02
7.	Teh	122.500	122.900	0,33
8.	Lada	117.600	118.000	0,34
9.	Cengkeh	312.000	316.000	1,28
10.	Pala	164.000	171.000	4,27
11.	Jambu mete	341.000	344.000	0,88
12.	Nilam	32.400	32.600	0,62
13.	Kapas	7.000	7.000	0
14.	Tembakau	285.000	291.000	2,11
15.	Kemiri Sunan	25	25	0
16.	Sagu	1.400	1.400	0

Sumber : Renstra Ditjen Perkebunan 2015 – 2019

Tabel 9. Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2018

No.	Komoditas	Sasaran Produksi (Ton)		Peningkatan (%)
		2017	2018	
1.	Tebu (gula)	2.698.000	2.949.000	9,30
2.	Kelapa Sawit (CPO)	32.657.000	34.515.000	5,69
3.	Karet (karet kering)	3.559.000	3.683.000	3,48
4.	Kelapa (kopra)	3.401.000	3.446.000	1,32
5.	Kakao (biji kering)	872.000	916.000	5,05
6.	Kopi (kopi berasan)	751.000	765.000	1,86
7.	Teh (daun kering)	161.200	162.000	0,50
8.	Lada (lada kering)	95.100	96.200	1,16
9.	Cengkeh (bunga kering)	116.800	119.000	1,88
10.	Pala (biji kering)	30.400	31.800	4,61
11.	Jambu Mete (gelondong kering)	126.600	129.600	2,37
12.	Nilam (minyak nilam)	2.780	2.810	1,08
13.	Kapas (Serat berbiji)	2.000	2.090	4,5
14.	Tembakau (daun kering)	319.400	341.500	6,92

Sumber : Renstra Ditjen Perkebunan 2015 – 2019

d. Komoditas Peternakan

Sasaran produksi komoditas unggulan peternakan tahun 2018 tertera pada Tabel 10, Tabel 11, dan Tabel 12.

Tabel 10. Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Peternakan Tahun 2018

No.	Komoditas	Sasaran Produksi (Ton)		Peningkatan (%)
		2017	2018	
1.	Sapi potong	481.950	525.530	9,04
2.	Kerbau	29.740	30.440	2,35
3.	Kambing	67.230	67.750	0,77
4.	Domba	52.270	54.360	4,00
5.	Babi	375.800	398.090	5,93

No.	Komoditas	Sasaran Produksi (Ton)		Peningkatan (%)
		2017	2018	
6.	Unggas			
	a. Ayam Lokal	334.440	334.250	(0,06)
	b. Ayam Ras Petelur	119.510	131.460	10,00
	c. Ayam Ras Pedaging	2.805.260	2.934.000	4,59
	d. Itik	42.370	45.400	7,15
7.	Hasil Produksi Ternak			
	a. Telur ayam ras petelur	3.050.420	3.124.610	2,43
	b. Telur ayam buras	208.340	211.920	1,72
	c. Telur itik	307.100	318.900	3,84
	d. Susu	910.570	940.550	3,29

Sumber: Renstra Kementan 2015 – 2019

() Berarti minus

Tabel 11. Populasi Sapi dan Kerbau Target SIWAB Tahun 2017

No.	Jenis	Populasi (ekor)		Target	
		Total	Dewasa 2-8 th	IB Akseptor	Bunting
1.	Sapi Potong	13.597.154	5.622.835	4.000.000	3.000.187
2.	Sapi Perah	472.000	296.086		
3.	Kerbau	1.127.000	452.622		

Tabel 12. Optimalisasi Reproduksi (SIWAB) Tahun 2018

No.	Jenis	Optimalisasi (ekor)		
		Reguler	Introduksi	Total
1.	Sapi Potong	2.700.000	300.000	3.000.000
2.	Sapi Perah			
3.	Kerbau			

2.4 Sumber Daya Penyuluhan Pertanian

Sejak diberlakukan UU No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan, dukungan sumberdaya penyuluhan pertanian (sumberdaya manusia, kelembagaan, sarana prasarana dan pembiayaan) menunjukkan peningkatan walaupun belum sepenuhnya memberi dukungan terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien.

2.4.1 Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Ketenagaan penyuluhan pertanian terdiri dari Penyuluh Pertanian PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), dan Penyuluh Pertanian Swadaya, tertera pada Tabel 13.

Tabel 13. Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Tahun 2017

No.	Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian (orang)		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2017
1.	PNS	28.494	27.153	25.336
2.	THL-TBPP APBN	20.814	20.259	19.101
3.	THL-TBPP APBD	1.251	1.251	3.158
4.	Swadaya	13.169	16.596	24.572
5.	Swasta	-	-	104
Jumlah		63.728	65.259	72.271

Sumber data: SIMLUHTAN

Ketenagaan penyuluhan pertanian tersebar di Pusat, BBP2TP dan BPTP provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Namun demikian, jumlah Penyuluh Pertanian belum memenuhi ketentuan sesuai dengan amanah UU No. 19/2013, bahwa terkait penyediaan Penyuluh Pertanian paling sedikit satu orang Penyuluh Pertanian dalam satu desa/kelurahan.

2.4.2 Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

a. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (amanah UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 109 ayat (2) telah ditetapkan Peraturan Menteri No. 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana Permentan No. 43 Tahun 2016, penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi bagian urusan pertanian dan diwadahi dalam urusan pertanian/dinas lingkup pertanian.

Pada saat UU No. 23 tahun 2014 ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tetap dilaksanakan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2016. Dengan demikian, penyelenggaraan penyuluhan pertanian akan melekat di dalam layanan utama yang mendukung urusan bidang pertanian.

b. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Non Pemerintah

Sesuai dengan amanah UU No.16/2006, selain kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, juga ada kelembagaan penyuluhan petani/masyarakat, selain kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, yaitu Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan (Posluhdes), sebagai unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku

utama. Posluhdes merupakan tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha untuk melaksanakan berbagai kegiatan penyuluhan pertanian. Penumbuhkembangan Posluhdes ini dimotori oleh Penyuluh Pertanian Swadaya yang memfungsikannya sekaligus sebagai Unit Administrasi Penyuluh Pertanian Swadaya. Sampai saat ini telah tumbuh 6.596 unit Posluhdes di 27 provinsi.

2.4.3 Keragaan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.67/Permentan/ SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, kelembagaan petani terdiri dari Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok tani (gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian Nasional. Selanjutnya, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 70 ayat 2 menyatakan bahwa Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan pasal 80 ayat 2, BUMP berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keragaan kelembagaan petani dan KEP/BUMP tertera pada Tabel 14.

Tabel 14. Keragaan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Tahun 2017

No.	Kelembagaan Petani dan KEP	Jumlah (unit)
1.	Poktan	564,098
2.	Gapoktan	63,119
3.	Kelembagaan Ekonomi Petani (KOPTAN, BUMP)	14,487

Sumber data: Pusluhtan, BPPSDMP

Dari jumlah poktan dan gapoktan tersebut diketahui bahwa baru sebagian kecil kelembagaan petani dan KEP/BUMP yang telah berfungsi secara optimal. Untuk itu pendampingan dari Penyuluh Pertanian dalam upaya meningkatkan kapasitas poktan dan gapoktan dengan lebih intensif, melalui pengembangan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan di kalangan petani anggota poktan dan gapoktan, sehingga poktan dan gapoktan menjadi lebih kuat dan mandiri.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan daya saing dan posisi tawar petani, kapasitas poktan/gapoktan juga terus ditingkatkan melalui peningkatan akses terhadap berbagai layanan agribisnis, peningkatan skala usaha dan pengembangan jejaring kemitraan usaha. Untuk mewujudkan hal ini, telah dilakukan pendampingan ke arah penumbuhkembangan KEP/BUMP melalui dukungan dari aspek legal formal dan aspek-aspek pengembangan manajemen usaha dan penerapan prinsip-prinsip agribisnis. Dampak pendampingan ini telah mampu menumbuhkembangkan KEP/BUMP, baik yang belum berbadan hukum (KUB, LKMA) maupun yang sudah berbadan hukum dalam bentuk koperasi tani (koptan) atau badan usaha lainnya.

Keberadaan KEP/BUMP sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 14.487 unit, baik dalam bentuk koptan maupun badan usaha lainnya, umumnya masih dalam taraf awal pengembangan, sehingga memerlukan bimbingan pendampingan yang intensif. Hal ini disebabkan masih lemahnya kapasitas petani dalam pengelolaan administrasi keuangan, pengembangan jejaring pemasaran dan kemitraan usaha, dukungan permodalan usaha, dan

penerapan manajemen terpadu. Selain itu, juga terkendala oleh kurangnya kapasitas Penyuluh Pertanian dalam penumbuhkembangan KEP/BUMP, serta kurangnya pembinaan dari dinas/instansi terkait.

Berbeda dengan KEP/BUMP yang sudah berorientasi keuntungan, penumbuhkembangan asosiasi petani lebih dilandasi untuk membangun solidaritas, wahana untuk memperjuangkan aspirasi petani, membangun komitmen dalam perencanaan pola produksi untuk perlindungan harga dan keuntungan petani, serta untuk mengadvokasi pemerintah agar lebih berpihak kepada kepentingan petani.

BAB. III

EVALUASI PENYULUHAN PERTANIAN

TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan pertanian melalui sistem penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari pusat sampai di lapangan. Penyuluhan pertanian yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan sub sistem pembangunan pertanian merupakan rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha.

Evaluasi Penyuluhan Pertanian Tahun 2017 mencakup bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, meliputi usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen.

3.1 Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian pasca UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan PP 18/2016 Tentang Perangkat Daerah, telah diatur melalui regulasi berikut:

- a. Berdasarkan Surat Menteri Pertanian No. 02/SM.600/M/1/2015, tgl 5 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, bahwa penyelenggaraan fungsi penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota tetap dilaksanakan sesuai dengan UU No. 16/2006 karena tidak bertentangan dengan UU No. 23/2014.
- b. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka penyelenggaraan penyuluhan per-

tanian berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri berikut:

- 1) Permentan No. 40 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
- 2) Permentan No. 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Sebagaimana diatur dalam Permentan No. 43 Tahun 2016, penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi bagian urusan pertanian dan diwadahi dalam urusan pertanian/ dinas lingkup pertanian;
- 4) Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 320/9340/OTDA tanggal 8 November 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan. Surat Edaran ini telah ditindaklanjuti dengan surat Kepala Badan PPSDMP kepada Bupati/ Walikota seluruh Indonesia No. B-9522/SM.220/I/11/2017 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/ Kota, maka ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti:
 - a) Fungsi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota masuk dalam fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang pertanian dan ditangani oleh bidang atau seksi penyuluhan pertanian;
 - b) Dalam pelaksanaan operasional penyuluhan pertanian, agar dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan nomenklatur Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota;

- c) Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 Pasal 28 ayat (3), maka Balai Penyuluhan Pertanian merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator Penyuluh Pertanian. BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelaku utama, dan pelaku usaha dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- (1) Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian;
 - (2) Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - (3) Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - (4) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - (5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - (6) Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- c. Sistem penyuluhan pertanian masih tetap berjalan, meskipun pada saat ini masih terjadi transisi kelembagaan namun fungsi penyuluhan sudah terakomodasi dalam urusan bidang pertanian.

3.2 Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Sampai dengan tahun 2017, Penyuluh Pertanian berjumlah 72.271 orang, terdiri atas 25.336 orang Penyuluh Pertanian PNS, 22.259

orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian, 24.572 orang Penyuluh Pertanian Swadaya dan 104 orang Penyuluh Pertanian Swasta. Penyuluh Pertanian PNS berada di tiap tingkatan kelembagaan penyuluhan, dengan sebaran (a) di Pusat 315 orang yang terdiri dari 14 orang di Badan PPSDMP, 10 orang di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP), dan 285 orang di Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BPTP) seluruh Indonesia; (b) di provinsi 440 orang; (c) di kabupaten/kota 2.884 orang; (d) di kecamatan 11.474 orang; dan di desa/kelurahan 12.040 orang.

UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 46 ayat (4) menyatakan bahwa paling sedikit satu orang Penyuluh bertugas pada satu desa potensi pertanian. Kondisi saat ini Penyuluh Pertanian (PNS dan THL-TB) yang langsung mendampingi petani/poktan/gapoktan berjumlah 44.397 orang. Apabila jumlah Penyuluh Pertanian dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan, potensi pertanian (71.479 desa/kelurahan potensi pertanian) maka masih dibutuhkan 39.180 orang penyuluh.

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta, dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian melalui pelatihan/ diklat (diklat dasar, diklat alih kelompok, dan diklat teknis agribisnis);
- b. Bimbingan teknis/ apresiasi/ latihan/ kunjungan/ magang/ studi banding;
- c. Sertifikasi kompetensi penyuluh;
- d. Penumbuhan dan pengembangan peran Penyuluh Pertanian Swadaya;

- e. Optimalisasi peran Penyuluh Pertanian Swasta; dan
- f. Evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian (PNS dan THL-TB Penyuluh) secara berjenjang dan berkelanjutan.

3.3 Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian diselenggarakan melalui dukungan dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, baik lingkup Kementerian Pertanian maupun antarkementerian, swasta dan masyarakat. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum optimal, antara lain disebabkan oleh:

- a. Kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan sesuai dengan fungsinya;
- b. Kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan belum mampu berperan sebagai Pos Simpul Koordinasi (Posko) Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian;
- c. Kurangnya dukungan pendanaan untuk kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, baik dari APBN, APBD, maupun swasta/masyarakat;
- d. Berkurangnya tenaga Penyuluh Pertanian karena memasuki usia pensiun yang tidak diimbangi dengan rekrutmen penyuluh;
- e. Seringnya pergantian pimpinan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan penyuluhan;
- f. Kegiatan penyuluhan pertanian dianggap tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. Lemahnya koordinasi diantara lembaga penyuluhan pertanian dengan dinas teknis lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten/kota; dan

- h. Kurangnya dukungan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian.

Strategi penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan orang dewasa, penyuluhan sebagai gerakan masyarakat, penumbuhkembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan, keadilan dan kesetaraan gender, serta peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional. Strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan sinergitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian antar kelembagaan penyuluhan pertanian, dinas teknis, dan lembaga penelitian;
- b. Penguatan BPP sebagai pusat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan;
- c. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta;
- d. Pemberdayaan petani, kelembagaan petani dan KEP/BUMP menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing;
- e. Pengembangan dan penyebaran informasi/materi penyuluhan pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian; dan
- f. Pengembangan program dan kerjasama penyuluhan pertanian.

3.4 Prasarana, Sarana Penyuluhan Pertanian

Ketersediaan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dukungan prasarana dan sarana terhadap penyelenggaraan penyuluhan, antara lain dalam bentuk alat bantu penyuluhan pertanian sebanyak lebih kurang 1.522 unit komputer, 4 unit kendaraan roda 4 (mobil penyuluhan), 3.100 unit kendaraan roda dua, dan *soil tester* 5.200 unit.

3.5 Program dan Pembiayaan

a. Program

Untuk mendukung visi Kementerian Pertanian, Badan PPSDMP menetapkan 2 (dua) program aksi yaitu Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) dan Gerakan Regenerasi Muda Petani yang dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan dan pendidikan.

Untuk mendukung GPPT dan Gerakan Regenerasi Muda Petani tersebut, kegiatan utama yaitu:

- 1) Pemantapan sistem penyuluhan pertanian;
- 2) Pemantapan sistem pelatihan pertanian;
- 3) Pemantapan sistem pendidikan pertanian;
- 4) Dukungan administrasi manajemen dan teknis lainnya; dan
- 5) Pendidikan menengah pertanian.

Pelaksanaan GPPT dan Gerakan Regenerasi Muda Petani dilaksanakan melalui beberapa strategi, yaitu:

- 1) Penataan dan penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
- 2) Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi Penyuluh Pertanian melalui optimalisasi peran Penyuluh Pertanian (PNS, THL TB, Swadaya dan Swasta);
- 3) Penataan dan pengembangan usahatani yang mandiri dan berdaya saing;
- 4) Penataan serta peningkatan kompetensi THL-TBPP; dan
- 5) Penguatan BPP dan kelembagaan petani melalui kegiatan Sekolah Lapangan (SL) dan Aplikasi Paket Teknologi/ *Research Extension Linkage* (REL) serta pengembangan KEP.

b. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2017 didukung, baik melalui Dana Dekonsentrasi di 34 provinsi yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota.

Dana Dekonsentrasi di 34 provinsi yang bersumber dari APBN, meliputi:

- 1) Kegiatan SL komoditas strategis nasional;
- 2) Aplikasi Paket Teknologi/REL;
- 3) Pengembangan Sistem Informasi penyuluhan melalui jaringan internet (*Cyber Extension*);
- 4) Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN); dan
- 5) Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) bagi PNS dan THL-TBPP, honorarium dan asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan bagi THL-TBPP.

Dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian, sampai saat ini fasilitasnya belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari prosentase fasilitasi anggaran untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagian besar masih tergantung pada APBN.

3.6 Permasalahan

3.6.1 Masalah Perilaku

Permasalahan perilaku yang dihadapi para pelaku utama, pelaku usaha dan Penyuluh Pertanian/petugas masing-masing sub sektor sebagai berikut:

1. Tanaman Pangan

- a. Permasalahan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan:
 - 1) Pelaku utama/pelaku usaha belum sepenuhnya menerapkan inovasi teknologi budidaya padi, jagung dan kedelai;
 - 2) Umumnya pelaku utama/pelaku usaha belum memanfaatkan lahannya secara maksimal untuk padi, jagung dan kedelai;
 - 3) Terbatasnya jaringan irigasi serta pemanfaatan jaringan dan sumberdaya air yang ada belum optimal;
 - 4) Kurangnya pengelolaan jaringan Irigasi tersier;
 - 5) Ketersediaan benih padi, jagung dan kedelai bersertifikat masih terbatas;
 - 6) Sebagian benih bantuan padi, jagung dan kedelai tidak tumbuh;
 - 7) Umumnya petani masih menggunakan pupuk dan pestisida kimia yang tidak ramah lingkungan;
 - 8) Pengelolaan bantuan alsintan belum optimal;
 - 9) Akseibilitas pelaku utama/pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan masih lemah;
 - 10) Dampak Perubahan Iklim (DPI);
 - 11) Sering menghadapi gagal panen padi;
 - 12) Harga gabah/beras “jatuh” saat panen raya; dan
 - 13) Belum ada jaminan harga kedelai;

- b. Permasalahan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 1) Pada umumnya masyarakat masih tergantung pada beras sebagai makanan pokok;
 - 2) Umumnya masyarakat belum akses terhadap sumber informasi dan teknologi pangan lokal; dan
 - 3) Sebaran produksi pangan tidak merata, baik antar daerah maupun antar waktu.

2. Tanaman Hortikultura

- a. Umumnya budidaya bawang merah, aneka cabai dan sayuran lainnya belum dikelola berbasis kawasan;
- b. Umumnya budidaya sayuran dan tanaman obat belum dikelola berbasis kawasan di wilayah perbatasan;
- c. Umumnya budidaya buah (jeruk, mangga, manggis, pisang, dan buah lainnya (durian, kelengkeng, salak, nenas, srikaya, sukun) belum dikelola berbasis kawasan;
- d. Umumnya budidaya buah belum dikelola berbasis kawasan di wilayah perbatasan;
- e. Umumnya budidaya hortikultura belum dikelola berbasis kawasan;
- f. Umumnya petani sulit memperoleh benih unggul/bersertifikat untuk bawang merah, cabai, bawang putih, jeruk, buah lainnya (durian, kelengkeng, salak, nenas, srikaya, sukun);
- g. Umumnya petani belum melakukan budidaya cabai dan bawang merah secara organik;

- h. Umumnya petani belum melakukan pengendalian OPT dengan baik dan benar pada tanaman cabai dan bawang merah;
- i. Umumnya petani belum melakukan penanganan panen dan pascapanen dengan baik dan benar (GHP) pada tanaman cabai, bawang merah, dan hortikultura lainnya; dan
- j. Umumnya petani memasarkan cabai dan bawang merah dalam bentuk segar.

3. Tanaman Perkebunan

- a. Pekebun umumnya masih belum memahami usaha tani perkebunan yang berbasis kawasan;
- b. Pekebun umumnya belum memahami manfaat penggunaan benih bermutu, unggul dan bersertifikat;
- c. Terbatasnya ketersediaan benih bermutu unggul dan bersertifikat;
- d. Umumnya pekebun belum menerapkan teknologi budidaya tanaman perkebunan yang baik dan benar (*Good Agricultural Practices/GAP*);
- e. Umumnya pekebun belum memahami manfaat penerapan PHT;
- f. Umumnya pekebun dalam melaksanakan usaha taninya belum terintegrasi dengan usaha tani lainnya (antara lain: tanaman pangan, peternakan,dll);
- g. Umumnya pekebun belum menerapkan teknologi penanganan panen dan pasca panen yang baik dan benar (*Good Handling Practices/GHP*);

- h. Umumnya pekebun belum menerapkan tumpang-sari tanaman perkebunan dengan tanaman pangan;
- i. Umumnya pekebun belum mengembangkan secara luas komoditas perkebunan penghasil minyak nabati/*biofuel*;
- j. Umumnya pekebun belum akses terhadap sumber teknologi, informasi, modal dan pasar;
- k. Kapasitas kelembagaan petani/pekebun masih rendah sehingga posisi tawar lemah;
- l. Umumnya pekebun belum memahami DPI serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, budidaya tanaman perkebunan sesuai agroekosistem dan penerapan budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan;
- m. Umumnya pekebun/masyarakat dan pihak lainnya belum memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (regulasi) tentang pemanfaatan lahan lahan pertanian/perkebunan.

4. Peternakan

- a. Peternak belum sepenuhnya menerapkan inovasi teknologi budidaya ternak ruminansia besar, ternak ruminansia kecil, ternak unggas, dan aneka ternak;
- b. Umumnya peternak masih memelihara ternak ruminansia besar dan kecil secara tradisional (tidak dikandangkan) terutama di wilayah luar Pulau Jawa;
- c. Umumnya peternak belum mengenal berbagai jenis Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan belum memanfaatkan teknologi pengolahan limbah pertanian menjadi pakan ternak;

- d. Umumnya peternak belum menyadari pentingnya pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ);
- e. Umumnya jumlah dan kapasitas kelembagaan petani/ peternak masih rendah;
- f. Umumnya peternak belum mengenal petugas dibidang peternakan (PKB, Inseminator ATR);
- g. Umumnya kesadaran peternak dalam penyediaan pangan asal ternak belum memenuhi prinsip ASUH.

3.6.2 Masalah Non Perilaku

Selain masalah perilaku, dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian juga terdapat masalah yang bersifat non perilaku sebagai berikut:

1. Kelembagaan petani

- a. Berdasarkan data BPS tahun 2015 terdapat 37,75 juta Rumah Tangga Petani dan jumlah kelompok tani yang sudah tumbuh sebanyak 565.645 poktan (sumber: SIMLUHTAN 2017). Apabila perkiraan jumlah anggota setiap kelompok rata-rata 25 orang petani, maka jumlah petani yang bergabung dalam poktan baru 14,14 juta orang petani (44,61%). Hal ini berarti bahwa masih ada sekitar hampir 56% petani yang belum bergabung dalam poktan. Dengan demikian, motivasi petani untuk bergabung dalam poktan masih rendah.
- b. Kapasitas petani dan kelembagaan petani masih rendah, belum berorientasi pasar dan belum menerapkan prinsip-prinsip agribisnis dalam manajemen usahanya;

- c. Petani dan kelembagaan petani pada umumnya belum mampu menjalin kemitraan usaha, baik di hulu maupun di hilir terutama untuk memenuhi permintaan pasar produk hortikultura, baik dari aspek kualitas, kontinuitas, maupun kuantitas;
- d. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan KEP/BUMP; dan
- e. Posisi tawar dan kemitraan usaha peternak masih rendah.

2. Ketenagaan

- a. Ketenagaan Penyuluh Pertanian terbatas jumlah dan kapasitasnya;
- b. Rendahnya kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Pertanian;
- c. Kurangnya intensitas diklat dalam rangka peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian; dan
- d. Kurang lebih 3.500 orang Penyuluh Pertanian pada tahun 2016 sudah pensiun.

3. Penyelenggaraan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian belum efektif dan belum sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- b. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum berjalan sesuai prinsip-prinsip partisipatif;
- c. Belum optimalnya dukungan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian;

- d. Materi dan metode penyuluhan pertanian belum sepenuhnya mendukung pengembangan agribisnis komoditas unggulan daerah;
- e. Belum optimalnya transfer teknologi dari sumber informasi/teknologi kepada petani, sesuai dengan kebutuhan yang spesifik lokalita;
- f. Pembiayaan penyuluhan pertanian yang bersumber dari pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota, baik melalui dana dekonsentrasi, Dana Alokasi khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), APBD maupun kontribusi dari pelaku utama dan swasta masih terbatas; dan
- g. Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan pembiayaan pelaksanaan penyuluhan pertanian di daerah.

4. Koordinasi

- a. Kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di lapangan; dan
- b. Kurang intensifnya pembinaan dari dinas/instansi terkait terhadap pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani dan KEP/BUMP.

5. Lahan pertanian

- a. Kepemilikan lahan petani yang sempit;
- b. Tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif ke non pertanian; dan
- c. Penurunan kualitas/degradasi lahan.

6. Prasarana, Sarana dan Pembiayaan

Dukungan prasarana, sarana dan pembiayaan untuk kelembagaan penyuluhan pertanian provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan pada umumnya belum memadai. Kondisi fisik bangunan BPP sebagai posko program dalam kegiatan pembangunan pertanian yang berada dalam kondisi baik sebanyak 4.066 unit dari 5.232 unit (78%), dalam kondisi rusak 329 unit (6%), dan belum memiliki bangunan kantor atau sewa 837 unit (16%).

7. Teknologi dan Industri Hilir

- a. Keterbatasan modal petani dalam mengakses sumber teknologi dan inovasi; dan
- b. Industri hilir untuk menampung produk pertanian belum berkembang.

BAB. IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM AKSI PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2018

Perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian dilakukan dengan mengacu kepada visi dan misi penyuluhan pertanian. Visi penyuluhan pertanian yang ditetapkan yaitu *“Terwujudnya Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian yang Berdaya, Bermartabat, Mandiri, Sejahtera melalui Peningkatan Modal Sosial yang Adaptif terhadap Perubahan Lingkungan”*. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi penyuluhan pertanian sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan secara terencana dan berkesinambungan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian;
2. Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal, kreatif, inovatif, dan berorientasi bisnis;
3. Mengembangkan ketenagaan penyuluhan pertanian yang profesional dan memadai, serta memiliki jiwa kewirausahaan;
4. Menumbuhkembangkan dan memberdayakan kelembagaan petani dan KEP yang kuat, mandiri, berwirausaha dan berdaya saing; dan
5. Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi penyuluhan pertanian terhadap pencapaian visi dan misi penyuluhan pertanian tersebut, dikembangkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian secara berkelanjutan. Kebijakan dan strategi tersebut diarahkan guna mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap

sasaran penyuluhan pertanian yang meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama penyuluhan pertanian, yaitu pelaku utama dan pelaku usaha, sedangkan sasaran antara penyuluhan pertanian yaitu pemangku kepentingan lainnya, meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

4.1 Kebijakan

Kebijakan penyuluhan pertanian meliputi:

1. Penguatan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu, berbasis kawasan pertanian dan berkelanjutan;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian strategis nasional berbasis kawasan pertanian; dan
3. Peningkatan daya saing produk pertanian, ekspor, substitusi impor dan produksi bahan baku bioindustri.

4.2 Strategi

Strategi penguatan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu berbasis kawasan pertanian dan berkelanjutan, meliputi:

1. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, swadaya dan swasta;
2. Penguatan ketenagaan penyuluhan pertanian pemerintah, swadaya dan swasta;
3. Penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan;
4. Penguatan peran pemerintah daerah dan swasta dalam penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian; dan
5. Pengembangan penyuluhan pertanian melalui kerjasama ke-mitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*).

Kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian tersebut dijabarkan kedalam program dan kegiatan, sebagai berikut:

1. Program

Penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada visi dan misi penyuluhan pertanian. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian strategis nasional, dilaksanakan berbasis kawasan pertanian guna mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Adapun program penyuluhan pertanian, antara lain:

- a. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- b. Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya dan swasta;
- c. Pemberdayaan kelembagaan petani (poktan dan gapoktan) dan KEP;
- d. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian ASN/PNS, THL-TBPP, dan Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta;
- e. Peningkatan sinergitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian antarlembagaan penyuluhan pertanian, dinas teknis, dan lembaga penelitian;
- f. Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta;
- g. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Penyuluh Pertanian dan petani;

- h. Penumbuhan dan pengembangan kader/wirausahawan muda pertanian dalam upaya regenerasi petani berkelanjutan; dan
- i. Peningkatan dukungan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian berbasis teknologi kekinian.

BAB. V
RENCANA PENYULUHAN PERTANIAN
TAHUN 2018

Untuk mendukung program penyuluhan pertanian tahun 2018 dan dalam upaya pemecahan masalah penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2017, maka tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, sebagai berikut:

5.1 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

- a. Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Program;
- b. Pertemuan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Tahun 2019;
- c. Kerjasama Penyuluhan Pertanian Dalam dan Luar Negeri;
- d. Pembinaan dan Koordinasi Penyuluhan Pertanian;
- e. Administrasi Kegiatan;
- f. Penyusunan Pedoman Penyuluhan Pertanian;
- g. Pengawasan Program Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor;
- h. Pengawasan Program Sekolah Lapangan dan Aplikasi Paket Teknologi/REL;
- i. Pengawasan dan Pendampingan Program UPSUS (11 komoditas strategis nasional);
- j. Fasilitasi Wadah Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- k. Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN);

- l. Sinkronisasi dan Advokasi Kelembagaan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
- m. Koordinasi dan Sinkronisasi UPSUS SIWAB; dan
- n. Fasilitasi Revisi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketahanan Penyuluhan Pertanian.

5.2 Evaluasi Penyuluhan Pertanian

- a. Konsolidasi Audit dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- b. Pengembangan Sistem Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan (SILUHTAN);
- c. Penyusunan Laporan Bulanan, Tahunan dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah);
- d. Evaluasi Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (Pemerintah dan Petani); dan
- e. Pengendalian Intern Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Monitoring dan Evaluasi.

5.3 Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

- a. Sekolah Lapangan untuk mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Kecamatan (34 provinsi, 1.550 BPP, Penyuluh Pertanian pendamping, dan petani/kelompoktani di lokasi pajale dan kawasan perbatasan), dengan metode pelaksanaan:
 - Rembug Tani Desa;
 - Pertemuan Sekolah Lapangan;
 - Bahan Pembelajaran;
 - Fasilitasi Perjalanan Dinas; dan
 - Bantuan Transport Penyuluh Pertanian.

- b. Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di Balai Penyuluhan Kecamatan (68 BPP)
 - Rembug Tani;
 - Bahan Pembelajaran;
 - Kursus Tani;
 - FFD; dan
 - Pengawalan dan Pendampingan.
- c. Penyuluhan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk mendukung UPSUS (5.517 unit BPP):
 - Honorarium Admin SMIPP/SILUHTAN selama 4 Triwulan; dan
 - Honor penulisan artikel penyebaran informasi dan teknologi melalui cyber extension.
- d. Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan);
- e. Turunan UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
- f. Pemberian Penghargaan bagi BPP Terbaik.

5.4 Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

- a. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) PNS. Besaran BOP per wilayah sebagai berikut:

No.	Wilayah	BOP (Rp)
1.	Wilayah Barat	320.000
2.	Wilayah Tengah	400.000
3.	Wilayah Timur	480.000

- b. Honorarium dan Biaya Asuransi THL-TB Penyuluh Pertanian;

1) Besaran Honor berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Honor (Rp)
1.	S1/D4	4.485	2.000.000
2.	D3	1.150	1.500.000
3.	SLTA	6.835	1.200.000
Jumlah		12.544	-

2) Asuransi

Satker pengelola dana dekonsentrasi BPPSDMP Tahun 2018 membayarkan iuran premi untuk asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi masing-masing THL-TBPP selama 12 bulan dengan besaran sesuai provinsi masing-masing dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya (Kursus tani, Rembug Tani dan Kunjungan Lapangan);
- d. Cadangan Penyesuaian Ijazah/BOP PNS;
- e. Pertemuan Koordinasi Program dengan Penyuluh Pertanian Provinsi;
- f. Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian Pusat;
- g. Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- h. Pembinaan Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TBPP dan Swadaya);
- i. Sosialisasi Pengangkatan THL-TBPP menjadi ASN PPPK;
- j. Pengelolaan Validasi/Verifikasi Data THL-TB Penyuluh Pertanian menjadi PPPK;
- k. Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian Pusat;

- l. Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- m. Pembinaan Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TBPP dan Swadaya);
- n. Sosialisasi Pengangkatan THL-TBPP menjadi ASN PPPK;
- o. Pembinaan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Pusat;
- p. Rancang Bangun Sistem Aplikasi Penilaian Angka Kredit Berbasis Online;
- q. Penyesuaian Ijazah THL-TBPP; dan
- r. Pemberian Penghargaan bagi Penyuluh Pertanian Teladan Terbaik.

5.5 Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

- 1. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan KEP
 - a. Verifikasi dan Validasi Database Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
 - b. Penumbuhan dan pengembangan KEP (50 KEP/50 BPP) di 15 provinsi, (1 BPP difasilitasi 1 KEP);
 - c. Penguatan KEP/ Korporasi Petani;
 - d. Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan KEP Bagi Petugas;
 - e. Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Kelembagaan Petani dan KEP;
 - f. Pemberian Penghargaan Bagi Petani, Gapoktan dan KEP Berprestasi; dan
 - g. Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

2. Penyediaan dan Penyebaran Materi/Informasi Penyuluhan Pertanian
 - a. Pengembangan SIMLUHTAN dan *Cyber Extension*;
 - b. Pengembangan Sistem dan Integrasi Data Penyuluhan Pertanian;
 - c. Penyusunan dan Penyebaran Materi Melalui Media Cetak;
 - d. Penyusunan dan Penyebaran Materi Melalui Media Elektronik;
 - e. Penyusunan dan Penyebaran Melalui *Cyber Extension*;
 - f. Penyusunan Majalah Ekstensia;
 - g. Pembinaan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP);
 - h. Koordinasi Pengelolaan Data, Informasi dan Materi Penyuluhan Pertanian;
 - i. Penderasan Arus Informasi Teknologi dan Capaian Kinerja; dan
 - j. Aplikasi Paket Teknologi Pertanian atau *Research Extension Linkage* (REL);

3. Jenis Materi Penyuluhan Pertanian

Materi penyuluhan pertanian untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2018 untuk masing-masing sub sektor, sebagai berikut:

- a. Materi Penyuluhan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan (Padi, Jagung, dan Kedelai)
 - 1) Penerapan teknologi budidaya Padi Inbrida Sawah, Padi Hibrida, Padi Organik, Padi Hazton, Padi Salibu, Mina Padi, Padi Gogo, beras khusus;

- 2) Penerapan teknologi budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum-1, Jagung Hibrida Varietas Umum-2, Jagung Hibrida (pemupukan, pengolahan lahan dan pengaturan pola tanam);
- 3) Penerapan teknologi budidaya kedelai lahan kering/ tadah hujan, Kedelai Jenuh Air (KJA);
- 4) Tumpang Sari Kedelai dan Refugia Kedelai;
- 5) Unit pengolahan Pupuk Organik /UPPO;
- 6) Pergantian varietas melalui penggunaan benih varietas unggul baru;
- 7) Pengelolaan air melalui pemanfaatan teknologi hemat air;
- 8) Penggunaan Mekanisasi pertanian;
- 9) Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP);
- 10) Pemanfaatan lahan tidur;
- 11) Pengembangan komoditas padi, jagung dan kedelai dengan cara tumpang sari pada lahan perkebunan dan perhutani;
- 12) Penumbuhan Desa Mandiri Benih padi, jagung dan kedelai;
- 13) Pengawasan dan sertifikasi benih (benih bantuan);
- 14) Pengujian Mutu Benih;
- 15) Penggunaan teknologi GAP;
- 16) Penerapan Teknologi Pascapanen, Pengolahan sesuai GHP dan GMP;
- 17) Penanganan cepat OPT dan DPI berbasis aplikasi;

- 18) Manajemen Pemasaran hasil (melalui Tunda Jual/ Sistem Resi Gudang, Toko Tani Indonesia);
- 19) Peningkatan motivasi petani agar mau menanam kedelai;
- 20) Manajemen pemeliharaan jaringan irigasi oleh kelompok tani;
- 21) Memotivasi kelompok tani untuk membangun sumber air melalui antara lain pembuatan embung, bak penampungan air, penggunaan pompa, dam parit;
- 22) Pemanfaatan sumber sumber air yang ada secara optimal;
- 23) Pemeliharaan alsintan oleh kelompok tani secara berkelanjutan;
- 24) Penumbuhan dan pengembangan UPJA oleh poktan/ gapoktan/KEP;
- 25) Pemanfaatan pupuk organik melalui UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik) dan pestisida nabati;
- 26) Penerapan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI;
- 27) Pengenalan dan pemanfaatan sumber pembiayaan (antara lain: KUR, LKM, Koperasi);
- 28) Pengenalan dan pemanfaatan Asuransi Usaha Tani Padi;
- 29) Pengenalan dan pemantaatan aneka ragam pangan non beras;
- 30) Mengembangkan aneka pangan non beras;
- 31) Pola makan seimbang dan dampak positif terhadap kesehatan;

- 32) Pengenalan dan pemanfaatan komoditas pangan lokal non beras serta teknologi budidaya dan pengolahan (antara lain: sorgum, umbi-umbian, singkong ubi jalar, sagu, kacang-kacangan), sesuai dengan GAP, GHP dan GMP;
 - 33) Pengenalan sumber informasi (media cetak dan elektronik) tentang pangan lokal non beras;
 - 34) Penumbuh kembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM);
 - 35) Peningkatan partisipasi kelompok tani dalam penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
 - 36) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
 - 37) Penumbuhkembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - 38) Model Pengembangan Pangan Lokal.
- b. Materi Penyuluhan Pertanian Sub Sektor Hortikultura
- 1) Pengelolaan budidaya bawang merah, aneka cabai, dan sayuran lainnya berbasis kawasan;
 - 2) Pengendalian OPT tanaman cabai dan bawang merah secara organik;
 - 3) Pengelolaan budidaya sayuran dan tanaman obat berbasis kawasan di wilayah perbatasan;
 - 4) Pengelolaan budidaya buah: jeruk, mangga, manggis, pisang, dan buah lainnya (durian, kelengkeng, salak, nenas, srikaya, sukun) berbasis kawasan;
 - 5) Pengelolaan budidaya buah berbasis kawasan di wilayah perbatasan;

- 6) Pengelolaan budidaya florikultura berbasis kawasan;
 - 7) Penggunaan benih hortikultura bermutu /bersertifikat, untuk bawang merah (umbi), cabai, bawang putih, jeruk dan buah lainnya (durian, klengkeng, salak, nenas, srikaya, sukun);
 - 8) Pengembangan desa pertanian organik;
 - 9) Pengolahan produk cabai dan bawang merah) dan produk hortikultura lainnya; dan
 - 10) Sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura (cabai dan bawang merah).
- c. Materi Penyuluhan Pertanian Sub Sektor Perkebunan
- 1) Pengembangan usaha tani perkebunan berbasis kawasan;
 - 2) Manfaat penggunaan benih bermutu, unggul dan bersertifikat;
 - 3) Pengembangan penangkaran benih tanaman perkebunan;
 - 4) Penerapan GAP pada budidaya tanaman tahunan (karet, kelapa, kelapa kopyor, jambu mete dan sagu), dan budidaya tanaman semusim (tebu, kapas, tembakau, nilam);
 - 5) Teknik bongkar ratoon dan rawat ratoon pada tanaman tebu;
 - 6) PHT pada tanaman kakao, kopi, cengkeh, karet, kelapa, lada, teh jambu mete, tebu;
 - 7) Integrasi usaha tani perkebunan dengan usaha tani lainnya (antara lain: tanaman pangan, peternakan,dll);
 - 8) Penanganan teknologi panen dan pasca panen yang

baik dan benar (*Good Handling Practices/GHP*) tanaman tahunan¹⁾, tanaman semusim²⁾, tanaman rempah dan penyegar³⁾;

- 9) Pemanfaatan teknologi dan informasi usaha tani perkebunan;
- 10) Tumpang-sari tanaman perkebunan dengan tanaman pangan;
- 11) Pengenalan jenis komoditas perkebunan penghasil minyak nabati/biofuel;
- 12) Penerapan GAP untuk budidaya dan *Good Manufacturing Practices/GMP* untuk pengolahan pada komoditas perkebunan penghasil minyak nabati/biofuel;
- 13) Pengenalan DPI, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, budidaya perkebunan sesuai agro-ekosistem dan penerapan budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan;
- 14) Pemasaran komoditas tanaman tahunan^{*)}, tanaman rempah dan penyegar bidang perkebunan^{***)} yang menguntungkan pekebun;
- 15) Sumber-sumber pemodal usaha tani perkebunan
- 16) Penguatan kelembagaan petani/pekebun (kakao, kopi, teh, lada dan cengkeh) meliputi antara lain: kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan dan organisasi; dan
- 17) Peraturan perundang-undangan (regulasi) tentang pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan.

Catatan :

¹⁾ Tanaman tahunan: khususnya karet, kelapa sawit, kelapa;

²⁾ Tanaman semusim: khususnya tembakau, nilam, tebu;

³⁾ Tanaman rempah dan penyegar: khususnya kakao, kopi, cengkeh, pala

- d. Materi Penyuluhan Pertanian Sub Sektor Peternakan
- 1) Inseminasi Buatan (IB) pada sapi dan kerbau;
 - 2) Manajemen perkawinan (tanda-tanda dan periode birahi, sinkronisasi, dan teknik perkawinan dengan IB/ alami dan pemeriksaan kebuntingan);
 - 3) Penerapan teknologi penggemukan pada sapi potong, kambing dan domba;
 - 4) *Good Breeding Practices* ruminansia besar (sapi potong, sapi perah dan kerbau);
 - 5) *Good Breeding Practices* ruminansia kecil (kambing dan domba);
 - 6) Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ);
 - 7) Sanitasi dalam upaya pencegahan penyakit pada ternak;
 - 8) Pelayanan teknis dibidang peternakan;
 - 9) Tatalaksana perkandangan ternak ruminansia besar (antara lain: manfaat, kerugian);
 - 10) Pengenalan dan pengelolaan berbagai jenis Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - 11) Pemanfaatan lahan terbatas (lahan pekarangan, pematang sawah) untuk menghasilkan HPT terutama untuk ternak ruminansia kecil;
 - 12) Penerapan teknologi pengolahan pakan ternak dari limbah pertanian;
 - 13) Penerapan teknologi dalam upaya penjaminan mutu pangan asal ternak yang ASUH (daging, telur, susu);


- 14) Penerapan teknologi dan perlakuan khusus untuk kesejahteraan hewan; dan
- 15) Penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani/peternak meliputi antara lain: kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan dan organisasi.

BAB. VI


PENUTUP

Programa Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2018 sebagai bahan acuan bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah kerja masing-masing.

Selanjutnya Programa Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2018 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan bagi para Penyuluh Pertanian di Pusat Tahun 2018 guna memberi dukungan terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian.



LAMPIRAN



No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran*)	Kegiatan								Ket.	
					Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab		Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			c. Umumnya dalam budidaya florkultura belum dikleka berbasis kawasan	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	Pengelolaan budidaya florkultura berbasis kawasan.	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 provinsi, diutamakan: 5 prov di 10 kab/ kota	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
		3. Mengembangkan sistem perbenihan hortikultura	a. Umumnya petani sulit memperoleh benih unggul/ bersertifikat untuk bawang merah, cabai, bawang putih, jeruk, buah lainnya (durian, kelengkeng, salak, nenas, srikaya, sukun).	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	Benih unggul/ bersertifikat untuk bawang merah (umbi), cabai, bawang putih, jeruk, buah lainnya (durian, kelengkeng, salak, nenas, srikaya, sukun).	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 provinsi, diutamakan: 22 prov, cabai 31 prov, bawang putih 1 prov, jeruk 17 prov, buah lainnya 29 prov.	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
		4. Mengembangkan sistem perindungan hortikultura	a. Umumnya petani belum melakukan budidaya cabai dan bawang merah secara organik.	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	Pengembangan penangkaran benih bawang merah (umbi), cabai, bawang putih, jeruk, buah lainnya (durian, kelengkeng, salak, nenas, srikaya, sukun), di tingkat petani	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 provinsi, diutamakan: 1 prov.	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
			b. Umumnya petani belum melakukan pengendalian OPT dengan baik dan benar pada budidaya cabai dan bawang merah.	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	Keuntungan budidaya cabai dan bawang merah secara organik.	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik.	1 paket	34 provinsi, diutamakan: 250 desa, di 21 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					Pengembangan desa pertanian organik		1 paket	34 provinsi, diutamakan: 250 desa, di 21 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					Pengendalian OPT dengan baik dan benar pada budidaya cabai dan bawang merah.	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 provinsi, diutamakan: 33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran*)	Materi	Kegiatan							Ket.			
						Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab		Pelaksana		
1	2	3 5. Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.	4 a. Umumnya petani belum melakukan pascapanen dengan baik dan benar (GHP) pada budidaya cabai, bawang merah, dan hortikultura lainnya. b. Umumnya petani memasarkan cabai dan bawang merah dalam bentuk segar	5 Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	6 Pascapanen yang baik dan benar (GHP) untuk budidaya cabai, bawang merah, dan hortikultura lainnya.	7 Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	8 1 paket	9 34 provinsi, diutamakan: cabai dan bawang merah 33 prov (113 unit); hortikultura lainnya 3 prov (6 unit).	10 Januari - Desember 2018	11 PM	12 PM	13 Pusluhan - BPPSDMP	14 Penyuluh Pertanian	15		

RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN NASIONAL TAHUN 2018

SUB SEKTOR PERKEBUNAN

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran ¹⁾	Kegiatan							Ket.		
					Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya		Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Pelaksanaan usaha tani pekebun umumnya masih terpecah, belum berbasis kawasan	Meningkatkan pemahaman pekebun dalam berusaha tani berbasis kawasan	Pekebun umumnya masih belum menatahkan usaha tani perkebunan yang berbasis kawasan	Pekebun, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	6	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	8	33 prov	10	11	12	13	14	15
2.	Pekebun umumnya masih menggunakan benih asal	Meningkatkan pemahaman pekebun tentang manfaat penggunaan benih bersertifikat	a. Pekebun umumnya belum memahami manfaat penggunaan benih bermutu, unggul dan bersertifikat. b. Terbatasnya ketersediaan benih bermutu unggul dan bersertifikat.	Pekebun, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	7	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
3.	Produksi dan produktivitas umumnya tanaman tahunan dan penyegar serta tanaman semusim masih rendah	Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan rakyat (tanaman tahunan dan penyegar serta tanaman semusim)	Umumnya pekebun belum menerapkan teknologi budidaya tanaman perkebunan yang baik dan benar (Good Agricultural Practices/GAP)	Pekebun, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	8	a. Penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan (karet, kelapa, media cetak/ elektronik dan sagu). b. Teknik bongkar ratoon dan rawat ratoon (pada tanaman tebu)	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	

Kegiatan														
No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran*)	Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Ket.
1														
4.	Pekebun kakao, kopi, cengkeh, karet, kelapa, lada, teh, jambu mete dan tebu) umumnya belum menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan baik	Meningkatkan penerapan PHT dalam budidaya komoditas kakao, kopi, cengkeh, karet, kelapa, lada, teh, jambu mete dan tebu	Umumnya pekebun belum memahami manfaat penerapan PHT.	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	PHT pada tanaman kakao, kopi, cengkeh, karet, kelapa, lada, teh jambu mete, tebu	Media cetak, media elektronik dan web	8 1 paket	9 33 prov	10 Januari - Desember 2018	11 PM	12 PM	13 Pusluhan-BPPSDMP	14 Penyuluh Pertanian	15
5.	Pelaksanaan usaha tani tanaman perkebunan umumnya belum menerapkan sistem pertanian terpadu	Meningkatkan pemahaman pekebun dalam menerapkan sistem pertanian terpadu	Umumnya pekebun dalam melaksanakan usaha tani belum terintegrasi dengan usaha tani lainnya (antara lain: tanaman pangan, pelemakan, dll)	Pekebun, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	Integrasi usaha tani perkebunan dengan usaha tani lainnya (antara lain: tanaman pangan, pelemakan, dll);	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan-BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
6.	Mutu hasil produksi tanaman perkebunan rakyat (tanaman tahunan dan penyegar serta tanaman semusim) umumnya masih rendah	Meningkatkan mutu hasil tanaman perkebunan rakyat (tanaman tahunan dan penyegar serta tanaman semusim) untuk meningkatkan daya saing produk.	Umumnya pekebun belum menerapkan teknologi penanganan panen dan pasca panen yang baik dan benar (Good Handling Practices/GHP)	Pekebun, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	a. Penanganan teknologi panen dan pasca panen yang baik dan benar (Good Handling Practices/ GHP) tanaman tahunan (karet, kelapa sawit, kelapa) yang baik dan benar (GHP) b. Penanganan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan rempah dan penyegar (pala, kakao, kopi, cengkeh) yang baik dan benar (GHP)	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan-BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	

Kegiatan														
No	Kondisi	Tujuan	Masalah	Sasaran*)	Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					c. Peningkatan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan tanaman semusim (lembakau, nilam, tebu) yang baik dan benar (GHP)	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan-BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
7.	Pekebun masih mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi, informasi, modal dan pasar.	Meningkatkan aksesibilitas pekebun terhadap teknologi, informasi, modal dan pasar.	Umumnya pekebun belum akses terhadap sumber teknologi, informasi, modal dan pasar	Pekebun, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	a. Teknologi dan informasi usaha laini perkebunan b. Sumber-sumber modalan usaha laini perkebunan c. Pemasaran hasil-hasil produksi perkebunan	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan-BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
8.	Posisi tawar pekebun (kakao, kopi, teh, jada dan cengkeh) masih rendah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani/pekebun untuk memperkuat posisi tawar	Kapasitas kelembagaan petani/pekebun masih rendah sehingga posisi tawar lemah	Pekebun, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	Penguatan kelembagaan petani/pekebun meliputi antara lain: kepemimpinan, manajemen, kewirausahaan dan organisasi	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan-BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
9.	Penerapan tumpang sari tanaman pangan dengan tanaman perkebunan umumnya belum berkembang	Mengembangkan komoditas pangan di lahan perkebunan	Umumnya pekebun belum menerapkan tumpang sari tanaman perkebunan dengan tanaman pangan.	Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	a. tumpang sari tanaman perkebunan dengan tanaman pangan	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan-BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	

Kegiatan														
No	Kondisi	Tujuan	Masalah	Sasaran*)	Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ketersediaan komoditas nabati/biofuel masih terbatas	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan penghasil minyak nabati/biofuel.	Pekebun pada umumnya belum mengembangkan secara luas komoditas perkebunan penghasil minyak nabati/biofuel.	Pekebun, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Pelugas Lainnya	<p>a. Pengetahuan jenis komoditas perkebunan penghasil minyak nabati/biofuel</p> <p>b. Teknologi budidaya dan pengolahan komoditas perkebunan penghasil minyak nabati/biofuel</p>	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan-BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
10.	Ketersediaan komoditas nabati/biofuel masih terbatas	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan penghasil minyak nabati/biofuel.	Pekebun pada umumnya belum mengembangkan secara luas komoditas perkebunan penghasil minyak nabati/biofuel.	Pekebun, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Pelugas Lainnya	<p>a. Pengetahuan jenis komoditas perkebunan penghasil minyak nabati/biofuel</p> <p>b. Teknologi budidaya dan pengolahan komoditas perkebunan penghasil minyak nabati/biofuel</p>	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan-BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
11.	Pekebun umumnya belum sadar dan mampu mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI), mencegah kebakaran lahan perkebunan, penanganan agroekosistem dan penerapan budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan.	Meningkatkan kesadaran dan kemampuan pekebun dalam mengantisipasi DPI, kebakaran lahan, penanganan agroekosistem dan penerapan budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan	Umumnya pekebun belum memahami DPI, pencegahan kebakaran hutan, budidaya perkebunan sesuai agroekosistem dan penerapan budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan	Pekebun, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Pelugas Lainnya	<p>Pengenalan DPI, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, budidaya perkebunan sesuai agroekosistem dan penerapan budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan</p>	Media cetak, media elektronik dan web	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan-BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
12.	Status pemilikan lahan-lahan perkebunan sebagian masih terjadi konflik antara pekebun/masyarakat dan perusahaan/pihak lainnya	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (regulasi) tentang pemanfaatan lahan perkebunan	Umumnya pekebun/masyarakat dan belum memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (regulasi) tentang pemanfaatan lahan perkebunan	Pekebun, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Pelugas Lainnya	<p>Peraturan perundang-undangan (regulasi) tentang pemanfaatan lahan perkebunan</p>	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan-BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	

RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN NASIONAL TAHUN 2018

SUB SEKTOR PETERNAKAN

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran ¹⁾	Kegiatan									
					Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksana	Ket.
1.	Kebutuhan daging terus meningkat seiring dengan laju jumlah penduduk, sedangkan ketersediaan daging terbatas	1. Meningkatkan populasi ternak ruminansia besar, ternak ruminansia kecil, ternak unggas, dan aneka ternak	a. Peternak belum sepenuhnya menerapkan inovasi teknologi budidaya ternak ruminansia besar, ternak ruminansia kecil, ternak unggas, dan aneka ternak	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					a. Inseminasi Buatan (IB) pada sapi dan kerbau melalui media cetak dan elektronik	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusliahutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					b. Manajemen perkawinan (tanda-tanda dan mode birahi, inkubasi, dan telah perkawinan dengan IB)alami dan periklesan kebuntingan)	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Pusliahutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					c. Penerapan teknologi penggemukan pada sapi potong, kambing dan domba	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Pusliahutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					d. <i>Good breeding practices</i> ruminansia besar (sapi potong, sapi perah dan kerbau).	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Pusliahutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					e. <i>Good Breeding Practices</i> ruminansia kecil (kambing dan domba).	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Pusliahutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran*)	Kegiatan								Ket.		
					Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab		Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			b. Umumnya jumlah dan kapasitas kelembagaan perani/peternak masih rendah	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas lainnya	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan perani/peternak meliputi antara lain: kepemimpinan, manajemen, kewirausahaan dan organisasi	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Puslutan -BPPSDMP	Penyuluh Pertanian		
			c. Umumnya peternak belum mengenal pelugas dibidang peternakan (PKB, Inseminator ATR)	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas lainnya	Pelayanan teknis dibidang peternakan	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Puslutan -BPPSDMP	Penyuluh Pertanian		
			d. Umumnya peternak masih memelihara ternak ruminansia besar dan kecil secara tradisional (tidak dikandangkan) terutama di wilayah luar Pulau Jawa	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas lainnya	Talialaksana perkandangan ternak ruminansia besar (antara lain: manfaat, kerugian)	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Puslutan -BPPSDMP	Penyuluh Pertanian		
			e. Umumnya peternak belum mengenal berbagai jenis Ternak (HPT) dan belum memanfaatkan teknologi pengolahan limbah pertanian menjadi pakan ternak	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas lainnya	a. Pengelolan dan pengelolaan berbagai jenis Hijaun Pakan Ternak (HPT) b. Pemanfaatan lahan terbatas (lahan pekarangan, pematang sawah) untuk menghasilkan Hijaun Pakan Ternak (HPT) untuk ternak ruminansia kecil	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Puslutan -BPPSDMP	Penyuluh Pertanian		
						Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Puslutan -BPPSDMP	Penyuluh Pertanian		

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran*	Kegiatan								Ket.	
					Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab		Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					c. Penerapan teknologi pengolahan pakan ternak dari limbah pertanian	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Puslitian -BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
			f. Umumnya peternak belum menyadari pentingnya pengendalian dan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	Pelaku Utama, Pelaku Penyuluh Pertanian dan Petugas lain	a. Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Puslitian -BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					b. Sanitasi dalam upaya pencegahan penyakit pada ternak	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Puslitian -BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
2.	Penyediaan bahan pangan asal ternak yang di lakukan umumnya belum sepenuhnya memenuhi prinsip ASUH (aman, sehat, uluh dan halal)	Meningkatkan penyediaan bahan pangan asal ternak yang ASUH	Umumnya kesadaran peternak dalam penyediaan pangan asal ternak belum memenuhi prinsip ASUH	Pelaku Utama, Pelaku Penyuluh Pertanian dan Petugas lain	a. Penerapan teknologi dalam upaya penjaminan mutu pangan asal ternak yang ASUH (daging, telur dan susu)	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Puslitian -BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					b. Penerapan/ perlakuan dan teknologi untuk kesejahteraan hewan	Penyusunan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	APBN	Puslitian -BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	

RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN NASIONAL TAHUN 2018

SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran *)	Kegiatan								Ket.	
					Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab		Pelaksana
1.	Permintasan pangan terus meningkat seiring dengan laju jumlah penduduk, sedangkan ketersediaan pangan dunia semakin terbatas, sehingga harus swasembada pangan secara berkelanjutan dan memiliki cadangan yang memadai	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta mutu padi, jagung dan kedelai	1. Pelaku utama/peleaku usaha belum sepenuhnya menerapkan inovasi teknologi budidaya padi, jagung dan kedelai	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Peleaku Utama, Peleaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	a. Penerapan teknologi budidaya padi pada Sawah Padi Hibrida, Padi Organik, Padi Salibu, Mita Padi, Padi Gogo, beras khusus	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Puslutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					b. Penerapan teknologi budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum-1, Jagung Hibrida Varietas Umum-2, Jagung Hibrida (peranakan pengolahan lahan dan pengaturan pola tanam)	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Puslutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					c. Penerapan teknologi budidaya kedelai lahan kering/ladang hujan, Kedelai Jenuh Air (KJA),	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Puslutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					d. Tumpang Sari Kedelai dan Refugia Kedelai	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Puslutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					e. Unit pengolahan Pupuk Organik / UPPPO	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Puslutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran *)	Kegiatan								Ket.		
					Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab		Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					f. Perantian varietas melalui penggunaan benih varietas unggul baru padi jagung dan kedelai	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian		
					g. Pengelolaan air tanaman padi, jagung dan kedelai melalui pemanfaatan teknologi hemat air	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian		
					h. Mekanisasi pertanian untuk padi, jagung dan kedelai	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian		
					2. Unumnya pelaku utama/pelaku usaha belum memanfaatkan lahannya secara maksimal untuk padi, jagung dan kedelai	a. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi, jagung dan kedelai	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
						b. Pemanfaatan lahan tidur untuk padi, jagung dan kedelai	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
						c. Pengembangan komoditas padi, jagung dan kedelai dengan cara tumpang sari pada lahan perkebunan dan perhutani	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					3. Ketersediaan benih padi, jagung dan kedelai bersertifikat masih terbatas	Penumbuhan Desa Mandiri Benih padi, jagung dan kedelai	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran *)	Kegiatan								Ket.	
					Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab		Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4. Sebagian benih bantuan padi, jagung dan kedelai tidak tumbuh	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	a. Pengawasan dan sertifikasi benih padi, jagung, dan kedelai (benih bantuan)	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					b. Pengujian mutu benih padi, jagung dan kedelai	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
			5. Teknologi penanganan pascapanen padi, jagung dan kedelai belum diterapkan secara baik	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas Lainnya	Penerapan Teknologi Pascapanen, Pengolahan Padi, Jagung dan Kedelai sesuai GHP dan GMP	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
			6. Dampak Perubahan iklim (DPI)	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas lainnya	a. Penerapan Perlindungan Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai dari Gangguan OPT dan DPI b. Penanganan cepat OPT dan DPI berbasis aplikasi	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
			7. Harga gabah/ beras "jatuh" saat panen raya	Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Petugas	Manajemen Pemasaran hasil (melalui Tunda Jual/ Sistem Resi Gudang, Toko Tani Indonesia)	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
			8. Belum ada jaminan harga kedelai	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas lainnya	Peningkatan motivasi petani agar mau menanam kedelai	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	

Kegiatan														
No	Kadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran *)	Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			9. Kurangnya pengkajian jaringan irigasi tersier	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas lainnya	Manajemen pemeliharaan jaringan irigasi oleh kelompok tani	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Puslutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
			10. Terbatasnya jaringan irigasi serta pemanfaatan jaringan dan sumberdaya air yang ada belum optimal	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas lainnya	a. Memolvasi kelompok tani untuk memanfaatkan sumber sumber air melalui antara lain pembuatan embung, bak penampungan air, penggunaan pompa, dam panit. b. Pemanfaatan sumber sumber air yang ada secara optimal	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Puslutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
			11. Pengelabuan bantuan asiritan belum optimal	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas lainnya	a. Pemeliharaan asiritan oleh kelompok tani secara berkelanjutan b. Penumbuhan dan pengembangan UPJA oleh poktan/ gapoktan/KEP	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Puslutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
			12. Umumnya petani masih menggunakan pupuk dan pestisida kimia yang tidak ramah lingkungan	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas lainnya	Pemanfaatan pupuk organik melalui UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik) dan pestisida nabati	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Puslutan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	

Kegiatan														
No	Kedadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran *)	Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			13. Sering menghadapi gagal panen padi	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas lainnya	a. Pengenalan dan pemanfaatan Asuransi Usaha Tani Padi b. Penggunaan teknologi GAP	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Puslithan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
		2. Meningkatkan diversifikasi pangan untuk mencapai pola makan seimbang dan mengurangi ketergantungan pada pangan pokok beras dengan sumber pangan lokal lainnya	1. Pada umumnya masyarakat masih tergantung pada beras sebagai makanan pokok 2. Masyarakat belum akses terhadap sumber informasi dan teknologi pangan lokal	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas lainnya	a. Pengenalan dan pemanfaatan aneka ragam pangan non beras b. Mengembangkan aneka pangan non beras c. Pola makan seimbang dan dampak positif terhadap kesehatan	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Puslithan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
			2. Umumnya masyarakat belum akses terhadap sumber informasi dan teknologi pangan lokal	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Petugas lainnya	a. Pengenalan dan pemanfaatan komoditas pangan lokal pangan lokal non beras serta teknologi budidaya dan pengolahan (antara lain: sagum, umbi-umbian, singkong ubi jalar, sagu, kacang-kacangan), sesuai dengan GAP, GHP dan GMP	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/elektronik	1 paket	33 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Puslithan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran *)	Kegiatan								Ket	
					Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab		Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					b. Pengenalan sumber informasi (media cetak dan elektronik)	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
		3. Mengupayakan ketersediaan pangan tidak merata, baik kebutuhan baik jumlah, mutu dan berkelanjutan	1. Sebaran produksi pangan tidak merata, baik antar daerah maupun antar waktu;	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Pelugas lainnya	a. Penumbuh kembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					b. Peningkatan partisipasi kelompok tani dalam penguatan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					c. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					d. Penumbuh kembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP)	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
					e. Model Pengembangan Pangan Lokal	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	
			2. Aksesibilitas Pelaku utama/ pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan masih lemah	Pelaku Utama, Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian dan Pelugas lainnya	Pengenalan dan pemanfaatan sumber pembiayaan (antara lain: KUR, LKM, Koperasi)	Penyusunan dan penyebaran materi melalui media cetak/ elektronik	1 paket	34 prov	Januari - Desember 2018	PM	PM	Pusluhan - BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	-